

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

1. Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut dari ibu kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya), dengan memiliki luas 1.191,25 km² dan juga dengan panjang pantai ± 140 km². Secara Geografis Kabupaten Gresik terletak pada posisi 112° 24' 8" sampai dengan 112° 38' BT dan 6° 50' 55" sampai dengan 7° 23' 37" LS. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali kecamatan panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter (Gresik Dalam Angka, 2015:3). Dilihat dari skala Jawa Timur terletak di posisi tengah bagian Utara. Secara administrasi Kabupaten Gresik berbatasan :

Sebelah utara	: Berbatasan dengan Laut Jawa,
Sebelah timur	: Selat Madura
Sebelah selatan	: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto,
Sebelah barat	: Kabupaten Lamongan

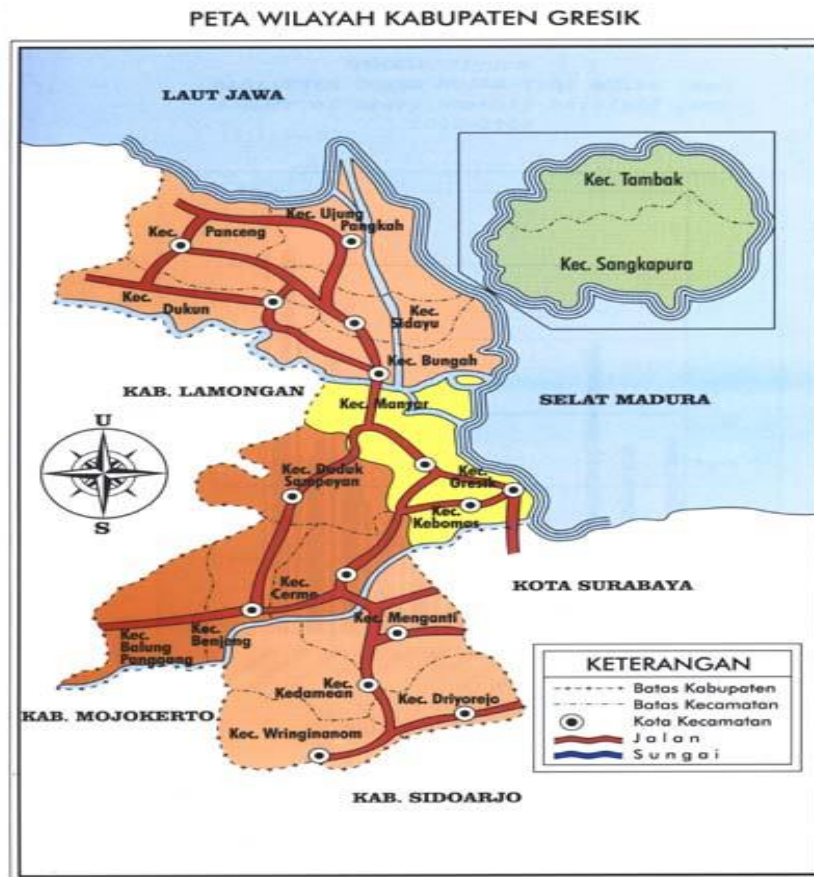
Secara administrasi pemerintahan, kawasan Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dan letak pantainya di bagian utara pulau jawa, yaitu sepanjang kecamatan kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Manyar, Bungah, dan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di pulau Bawean. Selain itu, Kabupaten Gresik juga merupakan salah satu kawasan yang menjadi kawasan Industri dan tergabung dalam Gerbang Kertausila di Jawa Timur yang terdiri dari Gresik, Bangkalan,

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kota Surabaya, sedangkan sebelah barat Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kab. Lamongan. Adapun berikut peta gambar serta tabel yang menunjukkan batasan wilayah dan wilayah administrasi Kabupaten Gresik.

Tabel 3. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)
1	Wringinanom	6262
2	Driyorejo	5130
3	Kedamean	6596
4	Menganti	6871
5	Cerme	7173
6	Benjeng	6126
7	Balongpanggung	6388
8	Duduksampeyan	7429
9	Kebomas	3006
10	Gresik	554
11	Manyar	9542
12	Bungah	7943
13	Sidayu	4713
14	Dukun	5909
15	Panceng	6259
16	Ujungpangkah	9482
17	Sangkapura	11872
18	Tambak	7870
Jumlah		119125

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2010



Gambar 6. Peta Kabupaten Gresik

Sumber: Gresik Dalam Angka, 2015

a. Topografi

Dalam perencanaan kota kemiringan lahan/topografi merupakan unsur yang penting untuk ditelaah. Kesesuaian lahan bagi peruntukkan bangunan tertentu tidak terlepas dari pertimbangan kemiringan lahan di kawasan tersebut. Pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik didominasi oleh dataran dan berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong (Masterplan Kawasan Minapolitan, 2011:III - 2).

Tabel 4. Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan Kabupaten Gresik (Ha)

No	Kecamatan	Lereng				Jumlah
		0 - 2 %	3 - 15 %	16 - 40 %	>40 %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wringinanom	3968,00	2286,00	0,00	0,00	6262,00
2	Driyorejo	4680,00	450,00	0,00	0,00	5130,00
3	Kedamean	5684,00	904,00	0,00	0,00	6596,00
4	Menganti	6196,00	0,00	0,00	0,00	6367,00
5	Cerme	6126,00	0,00	0,00	0,00	6126,00
6	Benjeng	6862,00	0,00	0,00	0,00	6871,00
7	Balongpanggang	7167,00	0,00	0,00	0,00	7167,00
8	Duduksampeyan	7440,00	0,00	0,00	0,00	7449,00
9	Kebomas	2409,00	518,00	39,00	0,00	3433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8197,00	90,00	0,00	0,00	8671,00
12	Bungah	8022,00	0,00	0,00	0,00	7936,00
13	Sidayu	4713,00	0,00	0,00	0,00	4713,00
14	Dukun	5909,00	0,00	0,00	0,00	5909,00
15	Panceng	3897,00	2324,00	72,00	25,00	6259,00
16	Ujungpangkah	8063,00	972,00	243,00	192,00	10406,00
17	Sangkapura	4805,00	2050,34	4216,68	799,98	11872,00
18	Tambak	143,00	2656,94	4899,81	55,25	7739,00
	Jumlah	94613,00	12251,28	9470,49	1072,23	119.513,00
	Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: Masterpan Kawasan Minapolitan 2011

Melihat tabel diatas Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah dengan tingkat kelerengan dari 0-2 % hingga lebih dari 40 %. Luas wilayah Kecamatan dengan tingkat kelerengan lebih dari 40 % yaitu sangkapura dengan luas wilayah 799,98. Sedangkan tingkat kelerengan 0-2% yaitu kecamatan Tambak dengan luas wilayah 143,00. Dengan jumlah terbanyak ada pada Kecamatan Sangkapura dengan total luas wilayah 11872,00 dan jumlah wilayah yang paling rendah ada pada wilayah Kecamatan Kebomas dengan total 3433,00.

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas $\pm 6.318,00$ ha meliputi: Kecamatan Panceng
- 2) Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas $\pm 18.246,00$ ha, meliputi Kecamatan Wringinanom, Driyorejo dan Benjeng.
- 3) Wilayah dengan ketinggian 0 – 10 mdpl seluas $\pm 92.843,00$ ha meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik, kecuali pada kecamatan-kecamatan yang memiliki ketinggian > 20 mdpl dan ketinggian 10 – 20 mdpl.

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2 %, 3 – 15 %, dan 16 – 40 % serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2 % mempunyai luas $\pm 94.613,00$ ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit $\pm 1.072,23$ ha atau sekitar 0,91% (Masterplan Kawasan Minapolitan, 2011:III - 2).

b. Kependudukan

Hasil registrasi penduduk di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 1.319.314 jiwa, yang terdiri dari 664.288 jiwa penduduk laki-laki dan 655.026 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 370.363 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191,25 km² Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.108 jiwa/km². Secara total, pada tahun 2014 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 2014 Kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis kelamin sebesar 101. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

c. Potensi perikanan

Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya berada pada tanggung jawab masing – masing daerah, hal ini merupakan sebuah peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimisasi potensi perikanan yang dimiliki. Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik sebagai salah satu Kabupaten yang ikut berpartisipasi dan menyiapkan kawasannya agar ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.

Kabupaten Gresik jika dilihat dari data perikanan yang cukup besar, di tandai dengan beberapa kondisi sumber daya alam yang melimpah menjadikan daya dukung Kabupaten Gresik dalam mengembangkan budidaya perikanan. Hal ini di tunjukan dengan kondisi wilayah Kabupaten Gresik yang hampir sepertiga wilayahnya merupakan kawasan pesisir pantai dengan panjang garis pantai 140 km, selain itu Kabupaten Gresik yang memiliki luas wilayah yang mencapai 1.192,25 km², di mana terdiri dari 996,14 km² luas wilayah daratan dan ditambah sekitar 196,11 km² luas pulau bawean. sedangkan luas wilayah perairannya sekitar 5.773,80 km² (Renstra Dnas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan 2011 - 2015).

Lahan produktif di kabupaten gresik telah dimanfaatkan menjadi perikanan budidaya tambak. Kabupaten Gresik memiliki potensi perikanan yang cukup besar jika mengacu pada Renstra Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan tahun 2011-2015 terutama pada perikanan budidaya, dengan luas 16.767,95 ha tambak air payau dan 8.538,96 ha tambak air tawar Kabupaten

Gresik juga memiliki potensi ikan dengan media kolam seluas 20,07 ha dan waduk 235,78 ha.

Luas wilayah yang hampir sepertiga berada dikawasan pesisir, potensi perikanan Kabupaten Gresik memiliki. Penangkapan perikanan di laut pada tahun 2014 mencapai 18.380,99 ton, pada budidaya perikanan yang terdiri dari tambak payau 47,895,18 ton, tambak tawar 51.049,38 ton, kolam 353,69 ton, perairan umum 353,69 ton, dan secara keseluruhan pada tahun 2014 total produksi perikanan mencapai 118.541,51 ton. Adapun berikut tabel rincian mengenai produktifitas mengenai sumber daya perikanan di Kabupaten Gresik 2015;

Tabel 5. Lahan Produksi Perikanan (Ha) di Kabupaten Gresik tahun 2014

No	Kecamatan	Penangkapan Dilaut	Budidaya				Jumlah
			Tambak Payau	Tambak Tawar	Kolam	Perairan Umum	
1	Wringinganom	-	-	-	-	-	-
2	Driyonorejo	-	-	-	-	-	-
3	Kedamean	-	-	-	-	-	-
4	Menganti	-	-	1.850,58	-	50,37	1.900,95
5	Cerme	-	3.622,85	13.431,52	-	49,48	17.103,85
6	Benjeng	-	-	3.758,67	118,68	15,23	3.892,58
7	Balong Panggang	-	-	-	60,93	-	60,93
8	Duduk Sampeyan	-	11.937,88	6.728,06	-	15,28	18.681,22
9	Kebomas	372,31	1.968,50	564,62	-	52,73	2.958,16
10	Gresik	2.802,62	-	-	-	-	2.801,61
11	Manyar	1.868,53	9.788,56	6.611,71	-	583,29	18.852,09
12	Bungah	2.067,63	6.404,68	6.740,31	59,75	15,43	15.287,80
13	Sidayu	914,04	5.324,04	4.477,32	-	47,81	11.030,21
14	Dukun	-	-	6.012,47	-	0,34	6.012,81
15	Panceng	2.293,11	724,32	202,54	33,52	13,07	3.284,56
16	Ujung Pangkah	3.500,21	8.106,35	404,58	51,90	19,24	12.081,48
17	Sangkapura	3.282,56	-	-	-	-	3.282,56
18	Tambak	1.279,98	-	-	29,72	-	1.309,70
Jumlah		18.380,99	47,895,18	51.049,38	353,69	862,27	118.541,51

(Sumber: Gresik Dalam Angka, 2015)

Dari data tabel diatas, dapat terlihat bahwa Kabupaten Gresik memiliki sumber daya perikanan yang cukup luas dan patut dikembangkan dengan hasil produksi yang mencapai 118.541,51 ton. Selain itu masyarakat yang bekerja di sektor perikanan baik pemilik dan pandega mencapai 18.067 jiwa. Banyak masyarakat yang memiliki tambak di Kabupaten Gresik, apa bila sektor perikanan di kembangkan dampak dominonya bukan hanya meningkatkan PDRB saja, akan tetapi juga terhadap sosial dan budaya masyarakat yang dimana masyarakat juga bermata pencarian di sektor perikanan menjadi ciri khas masyarakat pesisir. Selain itu tabel dibawah yang menunjukkan jumlah petani ikan di Kabupaten Gresik tahun 2014

Tabel 6. Jumlah Petani Ikan di Kabupaten Gresik Tahun 2014

No	Kecamatan	Petani Ikan		
		Pemilik	Pandega	Jumlah
1	Wringinganom	-	-	-
2	Driyonorejo		-	-
3	Kedamean		-	-
4	Menganti	316	48	364
5	Cerme	3.687	162	3.849
6	Benjeng	373	26	399
7	Balong Panggang	195	5	200
8	Duduk Sampeyan	3.362	217	3.579
9	Kebomas	327	8	335
10	Gresik	-	-	-
11	Manyar	2.679	139	2.818
12	Bungah	2.198	252	2.450
13	Sidayu	1.398	273	1.671
14	Dukun	947	135	1.082
15	Panceng	-	90	90
16	Ujung Pangkah	958	253	1.221
17	Sangkapura	6	1	7
18	Tambak	2	-	2
Jumlah		16.458	1.609	18.067

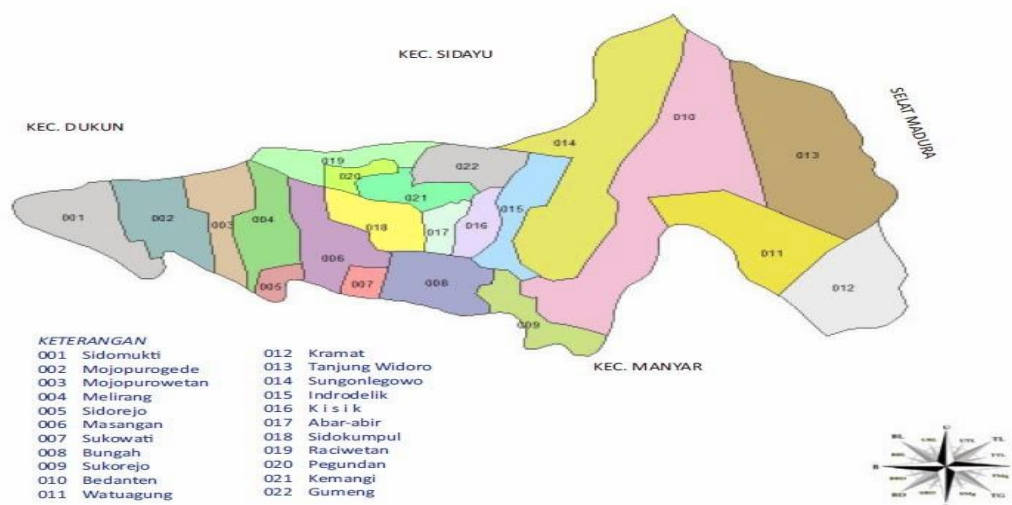
(Sumber: Gresik Dalam Angka, 2015)

Tabel diatas menjelaskan jumlah petani ikan diwilayah Kabupaten Gresik. Profesi petani serta pemilik lahan diwilayah Kabupaten Gresik terbesar ada pada Kecamatan cerme dengan jumlah 3.687 petani pemilik tambak. Sedangkan pandega atau buruh tani yangtidak memiliki tambak terbesar ada pada Kecamatan Sidayu dengan total 273 pandega.

2. Desa Kemangi

Desa Kemangi, merupakan desa yang berbatasan dengan desa pengundan di sebelah barat Kecamatan bungah Kabupaten Gresik, merupakan salah satu desa dari 22 desa di wilayah Kecamatan Bungah, yang berjarak kurang lebih 3 km dari kantor Kecamatan Bungah dengan kantor Kabupaten berjarak kurang lebih 21 km dan dengan kantor propinsi kurang lebih 35 km.

Desa Kemangi memiliki luas wilayah 367.001 hektar. Dimana dari total luas wilayah yang ada tersebut merupakan 141.741 Ha lahan sawah/tambak lahan pemukiman 7.210 Ha lahan pekarangan 0,187 Ha fasilitas umum 3,283 Ha Waduk/Danau/Situ 20.263 Ha lahan lainnya 179.741 Ha. Desa kemangi memiliki titik koordinat 112.567636 LS/LU -7.0214 BT/BB (Dokumen Desa Kemangi; 2016) desa Kemangi jelasnya dapat dilihat pada peta Desa Kemangi di bawah ini:



Gambar 7. Peta Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

(Sumber: Kantor Desa Kemangi 2016)

Berdasarkan gambar peta di atas juga dapat dilihat batas-batas wilayah dari Desa Kemangi. Desa Kemangi memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Raci wetan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Abar Abir dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gumeng serta sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kelurahan pengundan.

3. Kependudukan

Desa Kemangi memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.798 jiwa yang terbagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 896 dan penduduk perempuan sebanyak 902 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga mencapai 439 kk (Dokumen Desa Kemangi; 2016). Dan diklasifikasikan dalam 5 jenis kesejahteraan keluarga, yaitu keluarga prasejahtera dengan jumlah 187, keluarga sejahtera 1 dengan jumlah 200, keluarga sejahtera 2 dengan jumlah 32, keluarga sejahtera 3 dengan jumlah 11 dan keluarga sejahtera 3+ dengan jumlah 9. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7 . Jumlah Penduduk Desa Kemangi dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016

Jumlah Penduduk	1.798 Jiwa
Jumlah Penduduk Laki-laki	896 Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	902 Jiwa
Kepala Keluarga	439 Jiwa
Keluarga Prasejahtera	187 Jiwa
Keluarga Sejahtera 1	200 Jiwa
Keluarga Sejahtera 2	32 Jiwa
Keluarga Sejahtera 3	11 Jiwa
Keluarga Sejahtera 3+	9 Jiwa

Sumber : Dokumen Desa Kemangi Tahun 2016

B. Penyajian Data

Pada penyajian data dijabarkan tentang perolehan data penelitian berupa wawancara dan dokumentasi yang didapat dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan serta narasumber yang telah ditentukan di bab III. Perolehan data penelitian yang akan dijabarkan sesuai dengan fokus penelitian pada skripsi ini. Fokus penelitian tersebut berdasarkan teori John M Bryson (2007:55-70) tentang Perencanaan strategis, khususnya sepuluh langkah dalam perencanaan strategis. Fokus penelitian tersebut adalah:

1. Perencanaan Strategis Pengembangan Minapolitan, dalam Prespektif

John M Bryson

Pada fokus ini menjabarkan tentang sepuluh tahap John M Bryson (2007:55-70), sepuluh tahap ini menjadi pembandingan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dalam membuat perencanaan strategis yang akan dilakukan untuk lima tahun mendatang berupa rencana strategis tahun 2011-2015. Sepuluh langkah tersebut adalah:

a. Memprakarsai dan Menyepakati Proses Perencanaan Strategis

Mengacu pernyataan AK (L : 46th) yang merupakan staf seksi perikanan budidaya dalam wawancara :

“begini mas, yang mas maksud adalah yang memiliki andil dalam perencanaan pengembangan kawasan minapolitan, jadi dalam hal ini ada yang namanya FGD atau yang biasa disebut forum group discussion itu mas. Itu yang melakukan proses tersebut. Langkah ini merupakan menegosiasikan kesepakatan untuk menyelenggarakan perencanaan strategis dengan orang-orang penting pembuat keputusan (*decision makers*), orang-orang pembuat keputusan tersebut ada di FGD tadi mas, salah satunya adalah bapak Bupati sebagai pengarah serta dinas terkait, semisal dinas perikanan, kelautan, dan peternakan, secara garis besar mas yang saya pahami dari pertanyaan mas ini itu proses awal dalam pembentukan rencana strategis itu adanya surat keputusan Bupati yaitu pokja atau kelompok kerja pengembangan kawasan minapolitan. (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Berdasarkan hasil data wawancara diatas maka dapat dijabarkan proses prakarsa dan persetujuan perencanaan adalah diturunkannya surat keputusan Bupati untuk membentuk tim kelompok kerja penyusun perencanaan strategis. Proses mencapai kesepakatan awal ini bersifat langsung. Serta menjelaskan bahwa pembuat keputusan yang berkedudukan tinggi dari cabang eksekutif memulai proses perencanaan strategi administrasi, namun dalam memprakarsai perencanaan menegosiasikan kesepakatan untuk menyelenggarakan perencanaan strategis dengan orang-orang penting pembuat keputusan (*decision makers*) atau pembentuk opini (*opinions leaders*) dan para stakeholder baik internal maupun eksternal. Pernyataan staf seksi perikanan budidaya tersebut didukung pula dengan yang dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Kemangi sekaligus sekretaris desa. Sebagaimana hasil wawancara di bawah ini :

“Persiapan penyusunan kelompok kerja didalam pengembangan kawasan minapolitan dihadiri oleh hampir semua lapisan skpd yang ada di dalam wilayah kawasan minapolitan. Seperti FGD diadakan, acara ini dihadiri oleh perwakilan dari masing – masing wilayah.” (Wawancara Pada Tanggal 16 Juni 2016 Pukul 13.30 Wib Di rumah bapak MD (L : 51th) selaku Sekretaris Desa/Kelurahan).

Berdasarkan data wawancara diatas diperoleh informasi, maka kegiatan yang dilakukan, yang salah satu tugasnya menetapkan secara tepat siapa saja yang tergolong orang-orang penting pembuat keputusan. Tugas berikutnya adalah menetapkan orang, kelompok, unit atau organisasi manakah yang harus dilibatkan dalam penyusunan perencanaan strategis pengembangan kawasan minapolitan. Menetapkan orang, kelompok, unit atau organisasi dilakukan berdasarkan peran pemerintah Kabupaten Gresik sebagai fasilitator dan peran kepala daerah sebagai pembentuk dan mengesahkan tim Kelompok Kerja. Tim Kelompok kerja terdiri dari perwakilan dari unsur Lembaga teknis daerah, Dinas terkait, perangkat kecamatan, perangkat desa, masyarakat pemudidaya. Menurut LP (L: 51th) yang merupakan Kepala Dinas Perikanan dalam wawancara.

“dengan diturunkan sk Bupati tentang pembentukan kelompok kerja ini mas mas dapat tau peran masing – masing dinas mas, SKPD semuanya wajib melaksanakan apa yang sudah di tentukan untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan ini mas. Salah satu kebijakan fundamental ini mas yaitu mengarahkan SKPD untuk menyusun masterplan minapolitan.” (Wawancara Pada Tanggal 14/06/2016 Pukul 14.00 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak LP (L: 51th) selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Pernyataan tersebut dapat dijabarkan bahwa keterkaitan SKPD sangat di perlukan dalam mendukung perencana strategis pengembangan minapolitan, untuk menggali potensi perikanan di masing wilayah yang sudah ditentukan dengan mengarahkan untuk menyusun dokumen masterplan minapolitan.

Berdasarkan penyajian data diatas dapat diperoleh informasi, pada tahap pertama yaitu tahap Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis ada dua jenis kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik terkait pengembangan kawasan minapolitan. Kegiatan tersebut adalah rapat pembentukan tim penyusun dalam perencanaan strategis pengembangan kawasan minapolitan melalui forum group discution dan penyusunan masterplan terkait minapolitan. Anggota tim tersebut diwakili oleh berbagai unsur SKPD antara lain, dinas kelautan, perikanan dan peternakan, Dinas pekerjaan umum, dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, kecamatan wilayah pengembangan kawasan minapolitan.

b. Mengidentifikasi Mandat Organisasi

Dinas kelautan perikanan dan peternakan dalam bidang perencanaan strategis pengembangan minapolitan ialah bidang - bidang perikanan, bidang perikanan ini memiliki seksi dimana seksi ini sebagai pelaksana, seksi ini ialah seksi perikanan budidaya, seksi perikanan tangkap, seksi suaka dan plasma. Mandat Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan tertuang dalam Renstra Dinas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan memiliki dokumen lain terkait minapolitan dokumen tersebut ialah masterplan, sama halnya fungsi dari masterplan ini menjadi pedoman bagi pelaksana minapolitan tentunya dengan apa yang sudah ada dan ditentukan. Di dalam masterplan ada beberapa mandat terkait minapolitan, pernyataan di atas di perjelas oleh seksi perikanan budidaya AK (L : 46th) dalam pernyataanya:

“begini mas dalam melaksanakan mandat kami semua adalah sebagai pelaksana mandat tersebut semua mandat ada di renstra kami tetapi khususnya minapolitan ini tercantum dasar – dasar hukum tentang perencanaan minapolitan itu mas, dokumen tersebut itu ialah masterplan. Masterplan tersebut menjelaskan semua yang dimandatkan di dinas kelautan, perikanan, dan peternakan dan disini kami melaksanakan program yang sudah ditentukan oleh renstra dan masterplan mas khususnya yang mas bahas perikanan budidaya, dan saya disini di bagian budidaya mas.” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dari penjelasan pernyataan narasumber program minapolitan tersebut dilaksanakan oleh dinas kelautan, perikanan, dan peternakan. Mandat formal ini adalah tugas dan fungsi dari suatu organisasi yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan, pasal-pasal, perjanjian-perjanjian yang mengikat dalam surat keputusan. Undang – undang yang menjadi dasar dinas kelautan, perikanan dan peternakan ialah peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah terutama pada dinas kelautan, perikanan dan peternakan pada paragraf 10 pasal 27 tentang mandat Bupati kepada dinas kelautan, perikanan, dan peternakan.

Keterangan diatas didukung oleh pernyataan LP (L: 51th) yang merupakan Kepala Dinas Perikanan dalam wawancara.

“mandat itu mas, bisa berasal dari perundang-undangan, bisa berasal dari keputusan Bupati, Peraturan bupati. Lah kalau dalam minapolitan ini kami langsung dari Kementrian mas. Diturunkan kepada Daerah untuk mengelola potensi perikanan disini. Sedangkan yang ada di Renstra mandat yang kami pakai itu dari peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah terutama pada dinas kelautan, perikanan dan peternakan pada paragraf 10 pasal 27 tentang mandat Bupati kepada dinas kelautan, perikanan, dan peternakan.” (Wawancara Pada Tanggal 14/06/2016 Pukul 14.00 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik)

dengan Bapak LP (L: 51th) selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa mandat organisasi bisa berasal dari Keputusan Bupati ataupun Perundang-Undangan yang menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

c. Memperjelas Misi dan Nilai-Nilai Organisasi

Misi secara umum diartikan lain yaitu menjelaskan tujuan organisasi, atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang dilakukannya. Pernyataan tersebut diperjelas oleh seksi perikanan budidaya AK (L : 46th) dalam pernyataannya

“sudah jelas mas, kalau mas ingin mengetahui visi misi kami dinas perikan, kelautan, dan peternakan ada di rencana strategis (Renstra) kami. Disitu tertuang jelas misi kami, kami disini hanya melaksanakan yang menjadi tupoksi kami. Misikan tujuan kita, apa sih yang kita tuju guna meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya? lah itu semua tercantum pada misi kita serta mengapa kita melakukan aya yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dapat diketahui dari data wawancara diatas misi renstra Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik ada pada Renstra dinas, dinas merupakan unsur dalam pelaksanaan misi organisasi. Berikut adalah misi dari Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan tahun 2011-2015 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan;
2. Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani;
5. Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif;
6. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh

Selanjutnya misi tersebut diwujudkan dalam arah pembangunan. Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam bidang perikanan untuk mendorong pengembangan minapolitan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan wilayah wilayah yang menjadi pusat minapolitan baik wilayah minapolis ataupun wilayah *heterland* (pendukung).

Untuk mencapai sebuah visi, diperlukan sebuah misi. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud. Hal tersebut sebagaimana dari hasil wawancara berikut ini :

“Misi Dinas Kelautan, perikanan, dan peternakan dirumuskan sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi seluruh pelaku pemerintahan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan. Misi ini diharapkan dapat mengikuti setiap perubahan situasi yang terjadi di masa depan. Dalam menentukan misi kami mempertimbangan potensi dan hambatan dari internal maupun eksternal” (Wawancara Pada Tanggal 14/06/2016 Pukul 14.00 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak LP (L: 51th) selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa misi Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan merupakan pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi pelaku pemerintahan. Misi digunakan sebagai dasar atau batasan pelaku pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya misi Dinas Kelautan, Perikanan dan peternakan Kabupaten Gresik memiliki nilai dan prinsip yang dianut. Nilai merupakan berisi makna, pesan dan semangat yang menjiwai apa yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dinas. Sedangkan prinsip digunakan sebagai acuan dalam menentukan tindakan maupun pemikiran. Sehingga dalam segala tindakannya tidak melanggar prinsip dan nilai. Sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut :

“Nilai yang dianut dinas kelautan perikanan dan merupakan nilai agamis, adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas. Sedangkan prinsip yang dianut pemerintahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.”(Wawancara Pada Tanggal 14/06/2016 Pukul 14.00 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak LP (L: 51th) selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dapat dijabarkan dari data wawancara diatas, bahwa nilai yang terdapat dalam pelaksanaan pemerintah daerah oleh Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan adalah nilai agamis, adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas sedangkan prinsip yang dianut prinsip – prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

d. Menilai Lingkungan Internal dan Eksternal Organisasi untuk Mengidentifikasi SWOT

Menilai lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi swot penilaian lingkungan eksternal dan internal yang diuraikan menjadi wahana guna mengidentifikasi isu – isu strategis pada sub bab

selanjutnya. Pernyataan ini di dukung oleh pernyataan dari AK (L : 46th) dalam pernyataannya

“untuk menilai lingkungan internal dan eksternal ini mas sangat penting kita lakukan untuk menentukan isu – isu strategis apa saja yang di dapat organisasi, sebab mengapa itu menjadi pedoman kami dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dari Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan di renstra kita ada yang namanya faktor kunci keberhasilan, itu bisa kamu lihat di renstra” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dapat di jelaskan dari data wawancara diatas dari pernyataan tersebut faktor eksternal dan internal sangat berpengaruh dalam mencapai kunci keberhasilan organisasi, kunci keberhasilan memiliki fungsi memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Adapun faktor – faktor internal – internal pada minapolitan

a. Faktor Internal

1. Ketersediaan sumberdaya air melimpah
2. Produksi ikan melimpah
3. Tenaga kerja banyak
4. Pengalaman & Kemauan masyarakat untuk maju tinggi
5. Sudah ada kelompok Pokdakan
6. Ketahanan kualitas ikan rendah
7. Kondisi saluran tambak dan infrastruktur pendukung lainnya kurang memadai
8. Kemampuan SDM terbatas
9. Akses permodalan terbatas

10. Balai benih ikan terbatas
11. Belum ada pangkalan pendaratan ikan budidaya ditiap sub kawasan minapolitan
12. Jalan produksi kondisinya kurang mendukung
13. Peran kelembagaan masyarakat perikanan belum optimal

b. Faktor Eksternal

1. Konsumsi ikan akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk
2. Lokasi strategis (jalan arteri, tol, pelabuhan)
3. Komoditi ikan sesuai dikembangkan di wilayah perencanaan
4. Terdapat lembaga permodalan yang siap membantu
5. Produksi ikan banyak berpeluang untuk diolah
6. Banjir dari Bengawan Solo & Kali Lamong
7. Pencemaran lingkungan rumah tangga/ industri
8. Terbatasnya fasilitas pendingin yang menjaga kualitas ikan
9. Konversi lahan tambak mengurangi luas lahan budidaya
10. Menurunnya daya dukung lahan budidaya akibat penerapan cara- cara pembudidayaan ikan/udang yang tidak benar
11. Serangan penyakit dan hama

Faktor internal eksternal minapolitan di atas menjelaskan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan memiliki analisis strategi lingkungan eksternal – internal untuk perencanaan strategis minapolitan. Adanya faktor eksternal dan internal tersebut membuat organisasi melakukan analisis dalam

menentukan faktor – faktor kunci keberhasilan bagi organisasi untuk menentukan isu isu strategis yang didapat pada lingkungan minapolitan.

SWOT menjelaskan perumusan dari strategi, strategi di definisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumberdaya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal tersebut.

e. Mengidentifikasi Isu-Isu Strategis

Tujuan pokok sub bab ini mengidentifikasi pilihan pokok yang dihadapi organisasi. Pernyataan ini di dukung oleh pernyataan dari AK (L : 46th) dalam pernyataannya

“yang sampean maksud isu strategis ini kan kebijakan yang menjadi prioritas pilihan yang akan dihadapi organisasikan ? banyak mas isu isunya saat ini isu strategis yang kami hadapi salah satunya yaitu pengalihan fungsi lahan perikanan menjadi lahan industri meskipun itu ada perundangan yang mengaturnya, serta sumberdaya manusianya dan itu satu lagi mas koordinasi SKPD sama kelembagaan mas yang belum optimal” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dari pernyataan wawancara diatas dijelaskan dimana dinas perikanan kelautan memiliki isu strategis yang harus bisa di hadapi, tetapi di dalam renstra tidak terlampir isu – isu strategis. Dokumen renstra dinas kelautan, perikanan dan peternakan. Daftra isu strategis yang di hadapi oleh organisasi daftat ini harus memuat informasi guna membantu orang – orang dalam mempertimbangkan sifat, arti penting, dan implikasi tiap – tiap isu. AK (L : 46th) menambahkan

pernyataannya tentang isu strategis tentang permasalahan sumber daya manusia dalam pelaksanaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan.

“di Gresik tambaknya lebar-lebar, kondisi petani bukan kondisi yang di harapkan oleh dinas yang memiliki kemampuan, rata-rata petani yang ada di Gresik masih menggunakan cara yang tradisional, dan kita melakukan pembinaan pada kelompok tertentu yang harapannya dari pembinaan dan pelatihan petani dapat mengelola tambak yang dimiliki, dan nanti ilmunya itu dapat menyebar ke petani-petani yang lainnya, supaya mendukung dalam pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat”. (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat pembudidaya perikanan masih ada yang menggunakan cara tradisional, sehingga dapat menjadi landasan motivasi bagi Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia pada para pembudidaya agar para pembudidaya memiliki kemampuan mengelola tambak yang dimiliki melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan harapannya para pembudidaya mendapatkan ilmu maupun pengetahuan yang tujuannya dapat diterapkan dalam kegiatan budidaya perikanan. Dimana pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak MD (L : 51th) selaku Sekretaris Desa/Kelurahan

“benar mas kami para petani khususnya desa kemangi ini masih bodoh dalam melaksanakan proses pembudidayaan, awalnya kami asal – asalan untuk memulai budidaya ikan ini mas, kami hanya mengikuti apa yang orang tua kami dulu lakukan. Jadi kami petani sering mengalami kerugaian mas, tapi syukur dengan melihat potensi lahan tambak yang luas di Gresik ini dinas melakukan upaya upaya pelatihan, baik dari mulai tabur benih ikan, sampai panen.(Wawancara Pada Tanggal 16 Juni 2016 Pukul 13.30 Wib Di rumah bapak MD (L : 51th) selaku Sekretaris Desa/Kelurahan)”

Dapat diketahui bahwa pengembangan pada sumber daya manusia pernah oleh Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik bentuknya karena potensi dan permasalahan berbeda pula. Selain itu kegiatan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pembudiaya yang dimana merasa terbantu dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan daya dukung dalam pengembangan sumber daya manusia. Namun dilain sisi, adapun masyarakat pembudiaya yang dimana dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut tidak diikuti, sebab pembudidaya dalam melakukan kegiatan tersebut melauai perwakilan, dan ia hanya mendapatkan informasi tentang ilmu maupun pengetahuan pengelolaan budidaya dari rekan yang mengikuti perwakilan.

f. Merumuskan Strategi Untuk Mengeloa Isu

Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam dua hingga tiga atau empat/lima tahun mendatang. Menurut pernyataan dari AK (L : 46th) Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

“merumuskan strategi dalam mengeloa isu ya mas, itu harus mas langkah ini sangat penting dimana mas akan mengelola isu yang sudah ditemukan dilapangan sewaktu penelitian untuk dirumuskan menjadi sebuah strategi yang efektif pada waktu pelaksanaannya dengan adanya penilaian isu strategis tersebut mana mana strategi yang perlu kami atasi lebih dulu mas serta penerapan strategi apa yang harus dilakukan.” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dapat diperoleh informasi dari data wawancara diatas pada tahap ini apa yang ingin di capai organisasi apa yang menjadi impian organisasi dalam sebuah

perencanaan apa yang menjadi hambatan bagi organisasi serta membayangkan alternatif besar dalam menanggulangi isu khusus serta memberikan penilaian yang menjadi prioritas utama dari strategi minapolitan serta mengatur strategi apa yang harus dipakai untuk menghadapi isu strategi yang ada di miliki minapolitan.

Pada Desa kemangi strategi pemerintah yang sudah dilaksanakan masih sangat minim dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dimana sarana prasaranan masih sangat sederhana dan belum ada teknologi yang memadai serta akses jalan bagus tetapi masih minim dimana jalan masi sangat sempit, rehabilitasi saluran tambak masih minim, mengingat potensi perikanan Desa Kamangi cukup melimpah. Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan Bapak MD (L : 51th) selaku Sekretaris Desa/Kelurahan dalam pernyataannya

“Desa Kemangi ini mas ada bantuan perbaikan akses jalan memang tidak hanya kemangi saja semua dapat tapi sarana jalan yang masih biasa seperti pakai pafing belum diaspal kalau gak gitu jalan plester belum di beton yah tapi kai cukup bersyukur dimana akses jalan ini sudah bisa dilalui oleh mobil pengangkut hasil produksi kami.” (Wawancara Pada Tanggal 16 Juni 2016 Pukul 13.30 Wib Di rumah bapak MD (L : 51th) selaku Sekretaris Desa/Kelurahan)”

Informasi diperoleh dari kinerja pemerintah masih sangat banyak untuk mengurus minapolitan ini dibutuhkan strategi strategi yang dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah sehingga memberi dampak bagus yang dapat dirasakan masyarakat pembudidaya perikanan.

g. Mereview dan Menyetujui Strategi dan Rencana

Dinas kelautan, perikanan, dan peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan rencana strategis yang telah disiapkan sebelumnya dan melakukan review kembali rencana yang sudah sepakati dan menyetujui strategi

yang sudah ditetapkan. Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan AK (L : 46th) yang merupakan staf seksi perikanan budidaya dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 14/06/2016 di kantor Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan di Kabupaten Gresik,

“kami memang melakukan review kembali kepada rencana strategi yang sudah kami tetapkan di renstra mas, hal ini dapat membantu apa – apa saja yang perlu kami lakukan, karena tidak semua isu strategis yang ada sewaktu di lapangan sama. Soalnya dalam implementasinya kami sering mengalami kendala yang belum bisa kami atasi.” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Pernyataan tersebut memang perlu membahas kembali atau melihat kembali tentang strategi – strategi yang akan di implementasikan dan menjadi perbaikan untuk strategi yang akan dilakukan pernyataan diatas juga menjelaskan pemerintah harus meriview kembali strategi – strategi yang akan dilakukan agar memiliki keggiatan yang jelas dalam pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan serta isu krusial yang ada dalam minapolitan perikanan budidaya air tawar.

Menurut Bapak LP (L: 51th) selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik pada tanggal 14/06/2016 Pukul 14.00 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik “mereview faktor faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar bagi setiap strategi yang sedang dijalankan untuk mempermudah para pengambil keputusan sehingga saat dilaksanakan dapat berjalan efektif.”

h. Menyusun Suatu Visi Sukses Organisasi

Visi sebuah organisasi dapat ditentukan dengan memperhatikan potensi maupun kelemahan suatu organisasi. Visi sukses disebarkan di seluruh jajaran organisasi sehingga setiap anggota mengetahui dan diberikan inisiatifnya untuk mencapai tujuan. Berikut adalah visi dinas kelautan perikanan dan peternakan. Hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara berikut:

“Visi Dinas kelautan, perikanan, dan peternakan adalah Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera. Visi tersebut kami pilih karena untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang melimpah di Gresik ini. (Hasil wawancara dengan AK (L : 46th) yang merupakan staf seksi perikanan budidaya dalam wawancara pada hari kamis tanggal 14/06/2016).”

Visi tersebut bahwa dinas kelautan memiliki tujuan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional. Dinas kelautan perikanan dan peternakan kabupaten Gresik menggambarkan secara singkat jelas dan ringkas bagaimana organisasi harus terlibat. Visi tersebut dirumuskan dengan melihat kondisi, situasi, serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Potensi budidaya perikanan yang dominan di wilayah perencanaan adalah komoditi udang, bandeng, mujair, kakap, kerapu. Luas keseluruhan tambak di wilayah perencanaan 9.956,08 ha. Kecamatan yang memiliki lahan tambak terluas adalah Kecamatan Bungah, yaitu seluas 4.170,79 ha.

Sumberdaya perikanan tersebut bisa dilihat dari Potensi perikanan budidaya di Bungah, karena sepertiga wilayahnya digunakan sebagai tempat budidaya ikan baik air tawar dan air payau. Selain itu, komoditas perikanan

budidaya yang menjadi unggulan ialah komoditas udang vaname dan bandeng. Kedua komoditas tersebut menjadi basis produktifitas perikanan budidaya diwilayah dan membantu produktifitas perikanan budidaya di Kabupaten Gresik.

Selain itu udang vaname merupakan terobosan produksi perikanan budidaya yang dimana sebelumnya masyarakat pembudidaya banyak yang memproduksi udang windu. Namun pada waktu tertentu produksi udang windu sempat mengalami berbahai permasalahan terkait penyakit pada komoditas tersebut yang dimana menyebabkan kematian pada komoditas tersebut. Terlebih lagi pada desa kemangi. Dapat dilihat dari persebaran tambak dan luas wilayah perencanaan per hektarnya ini.terlebih lagi pada wilayah kemangi yang cukup besar.

Tabel 8. Persebaran Tambak dan Luasnya di Wilayah Perencanaan (ha) Tahun 2009

Kecamatan	Desa	Komoditi	Luas Ha)	
			Total	Dikelola
BUNGAH	Sungan Legowo	Udang/Bandeng	1072,26	1072,26
	Bedanten	Udang/Bandeng	1015,94	1015,94
	Indro Delik	Udang/Bandeng	71,5	71,5
	Kesik	Udang/Bandeng	36,93	36,93
	Watu Agung	Udang/Bandeng	235,75	235,75
	Tanjungwidoro	Udang/Bandeng	754,2	754,2
	Kramat	Udang/Bandeng	68,1	68,1
	Sidorejo	Udang/Bandeng	8,44	8,44
	Melirang	Udang/Bandeng	23,5	23,5
	Mojopuro wetan	Udang/Bandeng	71,46	71,46
	Mojopuro Gede	Udang/Bandeng	178,84	178,84
	Sidomukti	Udang/Bandeng	95	95
	Raci Wetan	Udang/Bandeng	99	99
	Begundan	Udang/Bandeng	74	74
	Gumeng	Udang/Bandeng	61,21	61,21

	Kemangi	Udang/Bandeng	289,66	289,66
	Abar-abir	Udang/Bandeng	15	15
	Jumlah		4170,79	4170,90

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik 2015

Melihat data tabel di atas dapat dijelaskan dinas kelautan perikanan dan peternakan dengan memperhatikan visi organisasi tentang pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut sudah memperhatikan kondisi, situasi, dan potensi yang dimiliki setiap daerah dan melakukan terobosan – tentang hasil produksi.

2. Peran Stakeholder

Masing – masing stakeholder pengembangan kawasan minapolitan ini berasal dari elemen yang berbeda – beda, masing masing dari anggota mempunyai tugas dan peran yang berbeda pula, berdasarkan keputusan Bupati Gresik nomor 523/244/HK/437.12/2011 di tetapkan pihak – pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola program pengembangan kawasan minapolitan ini adalah tim koordinasi dan kelompok kerja. Hal ini dijelaskan oleh AK (L : 46th) yang merupakan staf seksi perikanan budidaya dalam wawancara pada hari kamis tanggal 14/06/2016 di kantor Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan.

“pokja dan tim koordinasi sama mas itu satu kesatuan, tim ini dibentuk oleh Bupati melalui sk Bupati dan itu sudah tercantum dan tertulis dalam sk, ada kok mas surat sk tentang pokjanya, dan ketika ada rapat tentang minapolitan ini yah kami datang soalnya kami ada dan tertlis dalam sk pokja tersebut.” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dari penjelasan di atas dapat di interpretasikan bahwa pokja (kelompok kerja) pada pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gresik adalah yang bertanggung jawab dalam pengembangan kawasan minapolitan.

Dapat di ambil kesimpulan kelompok kerja merupakan satu – kesatuan dari pihak pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kawasan minapolitan di setiap kecamatan dan mempunyai tugas yang sama sebagai sebuah tim serta dalam aspek koordinasi tidak ada perbedaan karena semua keputusan diambil sebelumnya akan di koordinasikan bersama – sama. Perbedaanya terletak pada wewenang dari masing – masing anggota kelompok kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaganya masing - masing. Dalam hal ini tim kelompok kerja yang beranggotakan SKPD Kabupaten mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kebijakan minapolitan dengan sumberdaa anggaran yang dimiliki melalui program/ kegiatan pembangunan di masing masing instansinya, sedangkan kelompok kerja yang beranggotakan pemerintah kecamatan, perangkat desa dan masyarakat pembudidaya ikan tidak mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pembangunan di kawasan minapolitan karena tidak memiliki sumberdaya anggaran dan wewenang untuk melaksanakan pembangunan, sehingga kewenangan dari kelompok kerja adalah ikut dalam mengevaluasi kegiatan – kegiatan yang sudah dilakukan SKPD, serta ikut dalam memberikan saran dan masukan terkait program – program pembangunan yang sesuai dengan keadaan lapangan dan dibutuhkan oleh masyarakat kecamatan bungah khususnya di desa kemangi. Namun mekanisme pembagian kerja ini masih belum ada ketentuan secara formal yang mengaturnya, adapun keputusan Bupati Gresik nomor 523/244/HK/437.12/2011 tentang penetapan tim koordinasi dan kelompok kerja pengembangan kawasan minapolitan yang menjadi payung hukum bagi kelompok kerja dan mengatur keanggotaan dan tugas secara bersama – sama

sedangkan untuk mekanisme koordinasi dan perbedaan kewenangan antara kelompok kerja masih belum di atur di dalamnya.

Tugas dari kelompok kerja pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan bungah desa kemangi sesuai dengan Keputusan Bupati No.523/244/HK/437.12/2011 tentang penetapan tim koordinasi dan kelompok kerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan
2. Memberikan fasilitas kelembagaan dan pelayanan informasi kawasan minapolitan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program pengembangan kawasan minapolitan
4. Membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bupati melalui sekretaris daerah.

Sedangkan peran stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di desa kemangi kecamatan bungah sesuai dengan kewenangannya masing masing meliputi :

a. *Policy Creator* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Stakeholder yang berperan sebagai policy creator dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gresik adalah Bupati Gresik. Bupati Gresik selaku kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah Kabupaten Gresik mempunyai pengaruh dan peran yang sangat besar dalam

menentukan arah kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Gresik pada selanjutnya dijadikan sebagai arahan dan pedoman bagi Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan. Pernyataan tersebut didukung AK (L : 46th) yang merupakan staf seksi perikanan budidaya dalam wawancara pada hari kamis tanggal 14/06/2016 di kantor Dinas Perikanan,

“begini mas dalam hal ini minapolitan adalah peraturan menteri kkp mas, peraturan ini yang langsung turun kepada Bupati, Bupati menginstruksikan kepada kami untuk melaksanakan kebijakan pengembangan minapolitan ini mas, sudah ditentukan ada 18 kecamatan yang menjadi wilayah minapolitan di Kabupaten Gresik termasuk kecamatan bungah, peran Bupati disini sangat penting mas dari mulai awal penetapan Kabupaten Gresik sebagai kawasan minapolis. Pak Bupati juga menginstruksikan langsung khususnya kepada Bappeda untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan minapolis ini mas” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan diantara kebijakan fundamental yang diambil oleh Bupati Gresik dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan adalah kebijakan dalam mengarahkan SKPD yang terlibat untuk menyusun masterplan minapolitan sejak sebelum Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai kawasan minapolitan oleh KKP pada tahun 2011, kebijakan lain ialah tentang penetapan lokasi minapolitan, serta kebijakan pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Minapolitan.

Setelah di tetapkanya Kabupaten Gresik sebagai kawasan minapolitan melalui pengembangan kawasan minapolitan melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor kep.32/men/2010 pada tahun 2010, maka

Bupati Gresik mengeluarkan beberapa kebijakan - kebijakan untuk mendukung kawasan minapolitna ini yang tertuang dalam keputusan Bupati Gresik tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 523/396/HK/437.12/2010 dan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 523/244/HK/437.12/2011 yang menyatakan bahwa produk unggulan kawasan minapolitna Kabupaten Gresik adalah udang vaname dan bandeng meliputi desa kemangi kecamatan bungah. Kebijakan kebijakan terkait minapolitna yang di keluarkan oleh Bupati menjadi landasan dalam melaksanakan perencanaan pengembangan kawasan minapolitan.

a. Koordinator

Stakeholder yang berperan sebagai koordinator dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Bungah adalah Bappeda Kabupaten Gresik. Bappeda sebagai ketua sekaligus sebagai koordinator dalam pengembangan kawasan minapolitan berperan dalam menyelaraskan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder. Salah satu sarana dalam menyelaraskan gerak antar stakeholder adalah melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda. Hal ini di perkuat dengan pernyataan AK (L : 46th) yang merupakan staf seksi perikanan budidaya dalam wawancara pada hari kamis tanggal 14/06/2016 di kantor Dinas Perikanan

“dalam koordinasi ini ada yang menjadi ketua sekaligus koordinator itu Bappeda mas dari setiap SKPD yang berperan dalam bidang minapolitan ini, dimana keputusan ini berlaku sejak tertanggal 3 januari 2011 mas, kenapa harus ada koordinator ini untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara terpadu dalam pembangunan minapolitan. Kalau dalam bagian teknisnya kami selaku SKPD terkait yang melakukannya. Kita juga di koordinasi mas melaporkan hasil monitoring untuk 3 bulanan yang diadakan Bappeda agar koordinasi dapat

tersampaikan secara maksimal, tapi disisi lain itu masih banyak mas kelemahan contohnya hasil evaluasi yang dilakukan mengalami keterlambatan, keterlambatan ini karena kurang siapnya anggota dalam melakukan laporan karena setiap dinas kan memiliki kepentingan yang berbeda – beda tidak hanya urusan minapolitan ini saja.” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Bisa dilihat dari penjelasan data wawancara diatas bahwa Bappeda berperan sebagai koordinator setiap pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pengajuan usulan minapolitan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, hingga monitiring dan evaluasi dari pengembangan minapolitan. Bappeda memiliki peran yang besar dalam proses perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gresik yakni dengan melakukan survey langsung kelapangan, menjangring aspirasi masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan adanya koordinasi sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan minapolitan, adanya ketua yang menjadi koordinator semacam ini dirasa masih belum efektif, karena pengembangan kawasan minapolitan melibatkan banyak stakeholder dengan tugas, fungsi karakteristik yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan kegiatan koordinasi yang lebih intensif lagi untuk menyelaraskan kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan.

b. Fasilitator

Fasilitator dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan bungah, Desa Kemangi, Kabupaten Gresik adalah kelompok kerja minapolitan yang terdiri dari berbagai SKPD di kabupaten Gresik, SKPD kecamatan dan perwakilan dari pokdakan desa.

1) Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik

Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan bersama dengan Bappeda merupakan *leading actor* dalam perencanaan pengembangan minapolitan di kecamatan bungah, Desa Kemangi. Hal ini dikarenakan di kecamatan bungah, desa kemangi di dalam pengembangan kawasan minapolitan pengembangan masyarakat didasarkan atas komoditas perikanan budidaya sebagai penggerakannya. Maka dinas kelautan, perikanan, dan peternakan Kabupaten Gresik mempunyai tupoksi dan peran yang cukup besar dalam mengembangkan kawasan miapolitan berbasis budidaya di desa kemangi, kecamatan bungah.

a) Menyediakan Fasilitas Prasarana Perikanan Yang Sesuai Dengan Perkembangan Minapolitan

Bentuk penyediaan fasilitas prasarana perikanan oleh dinas kelautan, perikanan, dan peternakan kepada masyarakat diantaranya seperti kutipan wawancara:

“iya mas kecenderungan di Gresik untuk penggunaan teknologi secara tradisional sudah tidak mungkin kita temukan, dimana kita sudah memberi bantuan kepada petani tambak dalam hal mesin pompa air, lalu ada pelatihan pelatihan dari dinas kelautan, perikanan, dan peternakan untuk meningkatkan sumberdaya manusia, pelatihan tentang pengolahan hasil budidaya, kegiatan pelatihan pengolahan ini sifatnya agar masyarakat punya skill (kemampuan) dalam mengolah hasil perikanan dan tidak melulu langsung dijual kepada pasar tapi dengan adanya pelatihan ini setidaknya bisa memberikan nilai tambah, tapi bisa jadi kelak masyarakat berbudaya dalam mengolah hasil perikanan dan menciptakan industri pengolahan perikanan pada masyarakat, dan tidak tergantung hanya pada investor dalam mengelola hasil panen perikanan ini” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dalam wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa sudah banyak fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik.

b) Menyediakan dan Menyalurkan Informasi Tentang Prospek Pasar

Informasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi minapolitan berbasis perikanan budidaya, terlebih lagi komoditas unggulan merupakan komoditas konsumsi sehingga sasaran pasar dari komoditas unggulan ini adalah masyarakat, pasar, serta investor pengelola hasil perikanan budidaya ini. Maka dari itu informasi baik pasar atau untuk memasarkan hasil perikanan dari masyarakat sangatlah penting. Namun dalam hal ini dinas perikanan belum memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi terkait pasar untuk masyarakat.

Di desa kemangi kecamatan bungah fungsi dalam menyalurkan serta menyediakan informasi dilakukan oleh POKDAKAN Selain itu dalam Masterplan Minapolitan Kabupaten Gresik (2011:51) juga menjelaskan pada dasarnya kegiatan perikanan di wilayah perencanaan telah terkoordinir melalui suatu kelompoknya. Fungsi POKDAKAN saat ini adalah untuk memberi informasi pasar, pemenuhan kebutuhan pakan dan obat, akan tetapi perannya belum optimal mengingat keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung yang belum memadai.

“untuk meningkatkan peran dan pemasaran itu di serahkan pada masyarakat mas tetapi kita juga perlu memperhatikan pasar seperti apa yang di pilih oleh masyarakat. Dalam menentukan pasar mas ada beberapa aspek yang di perhatikan yang pertama Siapa konsumen yang akan dituju kedua, Jenis ikan yang disukai Ketiga, Berapa besar permintaan terhadap jenis komoditi ikan Selanjutnya Kemampuan daya beli masyarakat. Kita harus memperhatikan itu semua, sejauh mana semua itu berjalan saya kurang paham mas karena kami membantu dengan cara menyalurkan

informasi tentang pasar yang mereka tuju mas.” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa sebelumnya Dinas kelautan, perikanan, dan peternakan sudah memberi informasi tentang pasar yang harus dituju masyarakat.

c) Menyediakan Paket Teknologi Yang Sesuai Dengan Tingkat Perkembangan Minapolitan

Dalam meningkatkan perekonomian daerah berbasis perikanan, Dinas kelautan, perikanan dan peternakan memiliki peran yang sangat penting dengan telah beberapa kali memberikan kegiatan kegiatan pelatihan kepada pembudidaya ikan, baik yang berasal dari APBD atau dari kementrian kelautan dan perikanan RI yang kemudian di fasilitasi oleh dinas Kelautan, perikanan, dan peternakan. Dinas Kelautan, perikanan dan peternakan juga berperan besar pada pengembangan tehnologi budidaya perikanan di kecamatan bungah, desa kemangi, dengan member pelatihan menggunakan *Demplot Demonstration Plot* (Demplot) merupakan suatu metode penyuluhan perikanan budidaya kepada para pembudidaya dengan cara membuat lahan percontohan. Tujuan dari *demplot* ialah agar para pembudiaya melihat dan mengikuti cara pengelolaan tambak yang dijadikan sebagai lahan percontohan. Kegiatan *demplot* ini memerlukan beberapa syarat yang diantaranya kesiapan pembudidya, tambak layak dijadikan demplot, tersedianya anggaran, dan sarana prasana telah tersedia. Selain itu kegiatan ini dilakukan dengan cara bergantian disetiap wilayahnya, sebagai contoh tahun ini

demplot dilaksanakan di Ujungpangkah, lalu tahun berikutnya di Manyar, dan seterusnya. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Demplot, demonstrasi plot (tambak) maksudnya tambak yang dijadikan lahan percontohan, jadi gimana caranya masyarakat itu, akan bisa menirukan efeknya kesana. Untuk pelaksanaannya biasanya pemerintah menunjuk kelompok yang gampangnya siap sedia secara pendanaan, siap secara sdm, siap untuk lahan, kami nanti umpama rencananya akan membuat demplot ke kelompok-kelompok, harapan nanti gak semua orang mengikuti demonstrasi (percontohan), contoh tambak yang di iningkan ada pintu airnya, ada sumur bornya, syukur ada tandonya, mungkin kalo ada ada listriknya sebagai penggerak tenaga listrik untuk kincir, jadi semacam itu, dan tidak semua orang dapat ditunjuk pemerintah itu sebagai dem, itu prosesnya adalah identifikasi, yang satu kecamatan belum tentu, kan kelompoknya banyak gampangnya tahun ini kecamatan panceng, tahun mene (berikutnya) kecamatan ujung pangkah tidak semua bisa” (Wawancara pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 09.00 wib, lokasi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya)

Dari penjelasan wawancara diatas maka dapat dijabarkan bahwa demplot merupakan pelatihan kepada masyarakat pembudidaya dengan menggunakan lahan percontohan sebagai media pelatihan, serta dalam melakukan kegiatan demotration plot, ada beberapa syarat untuk melakukan kegiatan demplot itu sendiri, diantaranya identifikasi lokasi, anggaran yang mencukupi, sarana dan prasarana. Dan juga kegiatan ini dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya pada setiap kecamatan.



Gambar 8. Penebaran Benih Udang Vaname
(Sumber: Dokumentasi DKPP Kab. Gresik, 2015)

Dalam upaya meningkatkan perekonomian bidang minapolitan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan memberi paket bantuan yang diberikan kepada pembudidaya perikanan. Pemupukan modal masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, sebab kegiatan budidaya perikanan memerlukan modal oprasional. Pemupukan modal masyarakat yang dilakukan pemerintah dinas terkait melalui program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan dana dekonsentrasi. Kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan PUMP-PB serta Dana Dekonsentrasi ini dilakukan pada tahun 2011 dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan skala mikro.

Pokdakan merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PUMP-PB dan Dana Dekonsentrasi untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUMP-PB, Pokdakan didampingi oleh Tenaga Pendamping (Penyuluh atau PPTK) serta peningkatan ketrampilan. Melalui pelaksanaan PUMP-PB dan Dana Dekonsentrasi diharapkan Pokdakan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola pembudidaya ikan, dengan demikian kegiatan PUMP-PB dan bantuan Dana Dekonsentrasi diharapkan akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat para pembudidaya ikan, adapun berikut tujuan PUMP-PB dan Dana Dekonsentrasi:

- a. Mendorong upaya peningkatan produksi, nilai tambah komoditas dan tumbuhnya wirausaha baru dibidang perikanan budidaya.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan secara berkelanjutan melalui pengembangan wirausaha dibidang perikanan budidaya.
- c. Meningkatkan fungsi kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang kuat serta membangun jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam akses permodalan usaha perikanan budidaya.

Desa Kemangi merupakan salah satu wilayah yang dimana masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai pembudidaya ikan, hal itu juga menjadi tempat pelaksanaan kegiatan PUMP-PB dan bantuan Dana Dekonsentrasi. Selain itu kegiatan-kegiatan tersebut dapat mendorong para pembudidaya sebagai sumberdaya manusia agar terus melakukan produktifitas pada perikanan budidaya. hal tersebut juga disampaikan oleh sumber informan yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut sebagai berikut:

“Kegiatan PUMP-PB dan Dana Dekonsentrasi ini dasarnya mas punya tujuan yaitu memancing para pembudidaya agar giat melakukan produktifitas melalui suntikan dana yang didapatnya, nah dana tersebut sebagai pendorong para pembudidaya mas, dana yang didapat kisaran 35 hingga 100 juta tiap tahun beda-beda, tergantung kebijakan pemerintah pusat. Biasanya setiap tahun yang dapat bantuan sampai 20 kelompok pembudidaya. prosedurnya para pembudidaya mengajukan proposal dan nanti kami identifikasi lapangan, lalu hasil tersebut kami sampaikan ke DKP Prov. Jawa Timur, dan lalu di sampaikan ke KKP, dari KKP nantilah yang ngasih dana itu langsung ke rekening kelompok budidaya mas kalau dana dekon itu mas kita gunakan untuk pembangunan non fisik mas contohnya misal kegiatan pelatihan tentang pebangunan dibidang pendidikan atau pengetahuan tentang budidaya ikan. Bisa dibilang dana dekon itu lebih megedepankan aspek sumberdaya manusianya mas. Karena sumberdaya manusia itu menjadi dasar dari pembangunan fisik. Kalau sudah manusianya yah wilayahnya yang dibangun mas.” (Wawancara pada tanggal 17 juni 2016 pukul 09.30 wib, lokasi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak Eko Hadi Wijaya selaku Penyuluh Kegiatan Pemerintah)

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwasannya melalui bantuan PUMP dan Dana Dekonsentrasi perikanan budidaya kepada para pembudidaya khususnya Kemangi bertujuan untuk memberikan dorongan kepada para pembudidaya untuk meningkatkan produktifitas pada komoditas yang dimilikinya. Bantuan dari program PUMP-PB dan Dana Dekonsentrasi sendiri berupa dana, berikut data besaran dana PUMP-PB tiap tahun yang didapat oleh para kelompok pembudidaya:

Tabel 9. Besaran Dana Bantuan PUMP-PB

No	Tahun	Besaran (Juta Rupiah)
1	2011	100
2	2012	65
3	2013	60
4	2014	35
5	2015	60

Sumber : DKPP Kabupaten Gresik yang telah Diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat besaran dana yang didapat oleh para kelompok pembudidaya, selain itu adapun berikut tabel yang menunjukkan bantuan PUMP-PB di kecamatan Bungah pada kelompok pembudidaya ikan:



Gambar 9. penerimaan Dana Bantuan pada Desa

Sumber: Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun 2015

Melihat data diatas ternyata dana bantuan melalui PUMP masih belum di dapat oleh desa pada masing - masing kelompok di wilayah Kecamatan bungah, akan tetapi dana yang didapatkan ialah dana dekonsentrasi, sebagaimana yang dilihat pada tabel diatas. Dana dekonsentrasi ialah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Pendanaan dekon ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di daerah untuk mendukung penguatan

dan pemberdayaan peran Gubernur selaku Wakil pemerintah pusat, dan kegiatannya bersifat non-fisik. Jadi dana dekonsentrasi ini membantu dalam pembangunan non-fisik yang ada pada desa kemangi Pembangunan nonfisik yang berkaitan di desa kemangi ialah pembangunan manusia

d) Menyelenggarakan Pelatihan Bagi Masyarakat Desa Di Lokasi Minapolitan

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat pembudidaya ikan di desa kemangi, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan mempunyai peranan dalam memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan kepada para pembudidaya di desa kemangi hal ini sesuai dengan yang disampaikan bapak AK (L : 46th) sebagai berikut :

“Pembudidaya disini mas itu kebanyakan tekniknya yang dikuasai masih tradisional, untuk mengembangkan sdm kita ini banyak mengikuti pelatihan workshop serta ada demonstrasi plot di setiap kecamatan bergantian kami lihat disana mas ada juga pelatihan bagaimana cara tabur benih, pemupukan ikan, dan panen ikan. Kalau dalam pelatihan ini biasanya dilaksanakan tingkat provinsi dan pusat, jadi kalau seperti itu peran kita yah memfasilitasi dan membuat tim pendamping untuk mendampingi dalam pelaksanaannya dilapangan nanti.” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Penjelasan di atas oleh bapak AK (L : 46th) tersebut dibenarkan oleh para pembudidaya ikan yang ada di Kecamatan Bungah, Desa Kemangi seperti dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Di Desa kemangi ini dulu ada pelatihan – pelatihan mas semacam itu, bahkan kayaknya hampir setiap tahun ada pelatihan, yang mengadakan kegiatan – kegiatan tahunan ini biasanya dari Dinas Perikanan. Sistemnya biasanya perwakilan tiap kelompok pokdakan kalo kegiatan itu masi berlanjut dari tahun 2010 sampai 2014 terakhir, khususnya di desa kami.

Tetapi kalau ada pelatihan – pelatihan tingkat wilayah Jawa Timur kami masih mengikuti sebagai perwakilan pokdakan Desa Kemangi. Dimana ada perwakilan semisal anggota dari pokdakan 20 orang dan 5 sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan tersebut”. (Wawancara dengan Bapak MD (L : 51th) dalam pernyataannya pada tanggal 17 Juni 2016, pukul 11.00 Dirumah Bapak MD (L : 51th)).

Dari hasil data wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik mempunyai peran dalam mengembangkan sumber daya manusia para pembudidaya ikan di Kecamatan Bungah, Desa Kemangi melalui pelatihan terkait pembudidayaan ikan. Pelatihan yang ditujukan untuk pembudidaya ikan di Kecamatan Bungah Desa Kemangi tidak hanya diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten saja tetapi Dinas Perikanan Provinsi juga. Sehingga dalam hal ini Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan berperan dalam memfasilitasi untuk mengikuti pelatihan tersebut seperti memberikan informasi adanya pelatihan pada pembudidaya menanggung akomodasi dan transportasi pembudidaya serta membentuk tim khusus untuk mendampingi para pembudidaya dalam mengaplikasikan teknologi baru yang diperoleh dalam pelatihan tersebut.

2) Dinas Pekerjaan Umum

Sesuai yang tertuang dalam RPJM pengembangan kawasan minapolitan, Dinas PU mempunyai peran dalam menyediakan prasarana infrastruktur jalan dan saluran irigasi dan drainase yang sesuai dengan pengembangan kawasan minapolitan, terkait hal ini Bapak khofiuddin menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab program minapolitan di Kabupaten Gresik menjelaskan :

“semua dinas mas memang ada keterkaitan dalam program yang mengarah kepada pengembangan kawasan minapolitan seperti pembangunan saluran irigasi, jalan produksi, dan perbaikan infrastruktur jalan yang sesuai dengan tupoksinya. Untuk keterlibatan dinas PU di minapolitan biasanya langsung dari pusatnya, pusatnya itu BAPPEDA mas, atau juga dari dinas kami, Dinas Perikanan. Lah kira kira untuk program tahun ini yang menuju atau yang mendukung untuk pengembangan kawasan minapolitan itu mana saja. Dari Dinas PU sendiri biasanya memiliki program sendiri yang bersinggungan dan berkesinambungan dengan itu (pengembangan Kawasan Minapolitan) lah itu biasanya di sampaikan kepada Bappeda dan dinas perikanan, kalau sudah masuk DPA mas (daftar perencanaan anggaran) ya pasti direalisasikan begitupun juga dinas perikanan, kalau disini ya di survay dulu mas, kemudian mas dilelangkan sesuai dengan mekanisme pengerjaan paket yang sudah ada.” (Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.30 Wib Di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bapak AK (L : 46th) selaku Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Dari penjelasan data wawancara diatas diketahui dalam pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik, Dinas PU dan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik memiliki peran aktif sesuai dengan Tupoksi yang dimilikinya, yang mengarah pada penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan drainase yang mendukung kawasan minapolitan Kecamatan bungah, Desa kemangi. Dari penjelasan tersebut Dinas PU memiliki peran strategis dalam pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungah, Desa Kemangi hal ini dikarenakan di kawasan minapolitan sarana dan prasarana perikanan sangat dibutuhkan mengingat keberhasilan usaha budidaya ditentukan oleh jumlah, kualitas dan tingkat penyebaran sarana prasarana tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, Kecamatan Bungah, Desa Kemangi tidak memiliki kuantitas air yang melimpah meskipun letaknya dekat dengan hulu sungai bengawan solo maka sangat penting adanya drainase yang

menjadi penyalur air tersebut maka sangat penting bagi dinas PU dalam peranan ini. Untuk saat ini Desa Kemangi masih menggunakan kolam air tadah hujan. Kolam tadah hujan merupakan kolam atau penampungan air yang berfungsi untuk menampung air dengan fungsi yang sama yaitu memanfaatkan air ketika musim kemarau tiba untuk berbagai keperluan, baik budidaya ikan, mengalir lahan pertanian.

Adapun proses pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas PU dikawasan Minapolitan berdasarkan usulan dari Masyarakat di desa kemangi yang di okomodasi musrenbang dari mulai tingkat desa, Kecamatan dan musrenbang di tingkat Kabupaten. Selain itu masyarakat juga bisa mengusulkan pembangunan jalan di daerahnya tanpa melalui musrenbang, yakni dengan memberikan usulnya berupa Proposal pembangunan dari Desa dan direkap di Kecamatan setelah itu diusulkan Ketingkat Kabupaten yang pastinya akan ditentukan seleksi kelayakan terlebih dahulu sebelum bisa menjadi program pembangunan. Setelah itu usulan yang disetujui akan di realisasikan ditahun berikutnya hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak MD (L : 51th) dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“usuln dari masyarakat itu mas salah satunya melalui musrenbang yang pertama melalui musrenbang tingkat RT/RW, terus nanti akan musrenbang di tingkat Desa setelah dari tingkat Desa akan diusulkan ke tingkat Kecamatan lalu ketingkat Kabupaten kemudian akan dilihat kepentingannya seperti apa mas, jika kepentingannya sangat mendesak maka kepentingan tersebut akan menjadi program yang di utamakan. Pembangunan dari Dinas PU itu semua berasal dari usulan Masyarakat walaupun nanti tidak melalui musrenbang desa juga bisa mengusulkan melalui proposal kemudian di rekap di Kecamatan lalu diusulkan ke Kabupaten”. (wawancara pada tanggal 17 Juni 2016 di Kantor Desa, pukul 09.00 WIB)

3) SKPD Kecamatan Bungah

SKPD Kecamatan Bungah yang masuk dalam kelompok kerja Pembangunan kawasan minapolitan adalah Camat Bungah dan Kasi pembangunan, adapun peran dari SKPD Bungah Ibu RW (P : 47) selaku Kasih pembangunan Kecamatan Bungah mengungkapkan :

“keterlibatan kita dalam minapolitan ini secara garis besar hanya sebagai penyedia lahan karena kebetulan wilayah yang menjadi kawasan minapolitan adalah wilayah kita, kalo panitia sepenuhnya ada di Bappeda dan mereka yang melaksanakan pembangunan misalnya dalam penyusunan masterplan ya kita hanya diundang dan hanya membicarakan pokoknya saja mulai Kecamatan sampai Desa kita memang dilibatkan disana tetapi tidak mengikuti teknis pembangunannya jadi kita bisa disebut hanya mengikuti evaluasi kegiatan yang dilakukan Bappeda”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016, pukul 13.00 WIB, dikantor Kecamatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterlibatan SKPD Kecamatan Bungah dalam pembangua kawasan minapolitan adalah ikut dalam mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh SKPD Kabupaten Gresik diwilayah Kecamatan Bungah serta ikut memberi saran dan masukan bagi tim Pokja tim koordinasi terkait program – program yang sesuai dengan keadaan lapangan dan yang dibutuhkan masyarakat pembudidaya ikan dikawasan minapolitan.

4) Perangkat Desa Kemangi

Hampir sama dengan SKPD tingkat Kecamatan, perangkat desa di Desa Kemangi dalam hubungannya dengan tim koordinasi atau bisa disebut pokja pengembangan kawasan minapolitan juga berperan dalam mengevaluasi dan memberi saran serta masukan terkait program – program pengembangan kasawasa

minapolitan yang sesuai dengan kondisi lapangan yang dibutuhkan oleh masyarakat pembudidaya ikan. Selain itu karena perangkat desa yang lebih banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat pembudidaya ikan maka perangkat desa mempunyai peran langsung dalam membantu masyarakat ketika masyarakat membutuhkannya seperti yang dikatakan oleh bapak M.G (L: 43th) selaku pembudidaya ikan sekaligus ketua pokdakan di Desa Kemangi yang mengatakan :

“Sementara yang sudah berjalan ini mas terkait bantuan dari desa kan tidak ada cuman *support* secara swadaya kita mengerjakan bersama – sama dengan masyarakat maka perangkat desa juga turun langsung, termasuk mempermudah layanan administrasi yang terkait dengan sertifikasi tanah yang dibutuhkan oleh pembudidaya selain itu pelayanan tentang kebutuhan pupuk bagi pembudidaya, selain itu solidaritas ya alhamdulillah antara perangkat desa dengan masyarakat pembudidaya semisal ada panen pasti akan melakukan gotong royong adapun juga kami kan saat ini masih memakai kolam tadah hujan disitu kami membantu orang – orang yang sudah giliran menggunakan air tersebut dengan cara bergotong royong membersihkan kolam untuk digunakan kembali dengan menggunakan air tadah hujan tersebut”. (wawancara pada tanggal 15 juni Pukul 10.30 WIB di rumah Bapak M.G (L: 43th) di Desa Kemangi Kecamatan Bunga).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui perangkat desa adalah elemen yang paling dekat dengan masyarakat mempunyai peran *men-support* yang ada di desanya dengan cara memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat yang memerlukan misalnya sertifikasi tanah yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan serta pelayanan – pelayanan tentang pengambilan pupuk yang dibutuhkan masyarakat pembudidaya ikan, kemudian sebagai koordinator dalam pembangunan swadaya untuk turun langsung dalam membantu masyarakat ketika terjadi ada permasalahan di kolam masing - masing pembudidaya.

c. Implementor dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan

Implementator adalah *stakeholder* pelaksana kebijakan, didalamnya termasuk kelompok sasaran pengembangan kawasan minapolitan, dalam hal ini Implementer adalah masyarakat pembudidaya ikan di Desa Kemangi dalam pengembangan kawasan di Desa Kemangi masyarakat mempunyai peran sangat penting baik sebagai objek sasaran atau turun memberi saran kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan kawasan minapolitan. Keberadaan perwakilan masyarakat dalam sebuah kelompok kerja memiliki peran yang sangat strategis dimana dengan adanya perwakilan masyarakat pemerintah dapat mengetahui kondisi serta keadaan terkait program – program pengembangan kawasan minapolitan yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat khususnya oleh pembudidaya ikan di Desa Kemangi.

Peran masyarakat juga terlibat pada partisipasinya dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua pokdakan pada M.G (L: 43th) :

“Respon dari teman – teman pembudidaya ikan sangat bagus kalau pun ada pelatihan – pelatihan mereka dari dinas maupun dari provinsi mereka sangat semangat karena mereka mendapat pengetahuan baru. Jadi kita merasa senang mas dan kita juga aktif dalam mengikutinya tetapi secara bergiliran mas, kita juga melihat mas pelatihan pada demplot yang ada pada desa di Kecamatan yang sudah ditentukan sebagai acuan untuk membudidayakan ikan yang baik”. (wawancara pada tanggal 15 juni Pukul 10.30 WIB di rumah Bapak M.G (L: 43th) di Desa Kemangi Kecamatan Bunga).

Selain aktif sebagai peserta pembudidaya ikan masyarakat juga aktif sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan pembudidaya serta

kegiatan lain – lain dari pemerintah yang membutuhkan langsung bantuan dari masyarakat.

Dalam pengembangana kawasan minapolitan di Desa Kemangi mempunyai peran besar yang dijelaskan diatas namun disisi lain terdapat masyarakat yang pro aktif dalam program pengembangan kawasan minapolitan diungkapkan oleh Bapak MD (L : 51th) salah satu pembudidaya sekaligus Carik Desa Kemangi yang mengatakan :

“Dulu itu pernah ada mas bantuan – bantuan yang dipeberikan oleh pemerintah dengan dana sekian persen itu nanti diberikan peralatan seperti pupuk. lah pada saat itu mas pokdakan dibuatnya secara dadakan yang dihimbau oleh Dinas, pokdakan tersebut berisikan minimal 10 orang dan yang digandeng itu belum jelas apakah diantara mereka itu petani permanen atau petani semi permanen dan pada akhirnya yang bubar itu petani semi permanen maksudnya semi permanen ini lahannya asal – asalan kalau kemarau berhenti sedangkan kalau hujan kembali lagi untuk membudidaya ikan lagi. Makanya pokdakan sekarang sudah dibuat terstruktur mas dari mulai ketua sampai anggotanya agar tidak terjadi ketimpangan lagi”.(Wawancara dilakukan pada tanggal 16 juni 2016 di Kantor desa kemangi)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui sebagian masyarakat masih pro aktif terhadap program – program kawasan minapolitan hal ini diperkuat dengan partisipasi kelompok pembudidaya semakin menurun hal ini menggambarkan fungsi pengawasan dan pendampingan dari para *stakeholder* yang lain masih belum bisa dilaksanakan secara optimal sehingga kedepannya diperlukan pematangan koordinasi.

d. Akselerator dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan

Akselerator merupakan stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar program minopolitan lebih cepat dalam

pencapaiannya. Dalam pengembangan kawasan minapolitan yang berperan sebagai akselator adalah dinas perikanan itu sendiri sub bagian budidaya.

Dinas Kelautan memiliki UPT Pengembangan Budidaya dan Penangkapan ikan dan UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Ternak dimana masing – masing memiliki fungsi seperti pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan. Dalam menunjang pengembangan kawasan minapolitan di desa kemangi kecamatan bungah dinas kelautan, perikanan dan peternakan berperan dalam pengembangan teknis budidaya ikan konsumsi untuk masyarakat pembudidaya selain itu memberi pengarahan tentang benih yang berkualitas untuk pembudidaya seperti yang disampaikan oleh bapak Khofiyudin dalam wawancara :

“iya mas dalam usaha mempercepat kontribusi agar program minapolitan lebih cepat dalam pencapaiannya kami sub bagian perikanan budidaya mencoba mengoptimalkan dari upt – upt kami yang memiliki fungsi kaji terhadap budidaya ikan serta diseminasi teknologi kegiatan diseminasi teknologi dimaksudkan sebagai upaya menyebarluaskan teknologi mas, serta hasil-hasil perekayasa budidaya perikanan kepada masyarakat pengguna mas seperti pelatihan demplot, sehingga pada akhirnya diharapkan akan berdampak ke arah peningkatan kemampuan dan peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat”.(Wawancara dengan Bapak Khofiuddin dalam pernyataannya pada tanggal 16 Juni 2016, pukul 10.00 WIB Di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan).

Berdasarkan wawancara diatas Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sudah mencoba melakukan upaya yang maksimal dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pembudidaya di Desa Kemangi Kecamatan Bungah guna meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan produktivitas hasil budidaya perikanan. Kegiatan – kegiatan edukasi tentang budidaya ikan masih sangat kurang karena Kabupaten Gresik belum mempunyai balai benih sendiri fungsi dari balai benih itu sendiri adalah

menciptakan benih unggulan, benih yang produktif serta hal – hal yang terkait dengan pembenihan. Berikut pernyataan oleh Bapak Khofiudin :

“begini mas kita masih belum memiliki balai benih sendiri dimana dalam menghasilkan benih yang bagus masih belum bisa kita produksi. Adapun penyakit yang sering kita dapati dan yang masih belum kita pecahkan sekaligus selesaikan yaitu kematian udang, kalo ikan, biasanya itu disebabkan hama ketika kita tabur benih dimana ikan yang bukan ikan produksi yang ada didalam kolam tersebut memakan benih – benih ikan yang baru kita tabur seperti ikan bader, ikan bader itu mas salah satunya termasuk hama bagi pembudidaya ikan. Maka dari itu mas kita memberi pelatihan – pelatihan edukasi pencegahan penyakit terhadap udang serta perawatan kolam agar terhindar dari hama – hama ikan yang lain”.(Wawancara dengan Bapak Khofiuddin dalam pernyataannya pada tanggal 16 Juni 2016, pukul 10.00 WIB Di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan).

Produksi bahan baku merupakan kegiatan yang dimana masa praproduksi pada perikanan budidaya. Produksi bahan baku pada komoditas benih udang vaname dan bandeng yang terjadi di Kemangi, para pembudidaya mendapatkan benih yang berbeda-beda. Benih udang vaname biasanya para pembudidaya mendapatkan dari para penyalur, serta para penyalur tersebut mendapatkan benih-benih dari Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jepara. Sedangkan pada komoditas bandeng para pembudidaya mendapatkan dari penyalur yang berasal dari Kabupaten Tuban, dan lain sebagainya. Selain itu adapula masyarakat pembudidaya benih di Bungah yang nantinya benih-benih tersebut dijual ke para pembudidaya. Pemerintah Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik juga telah menyarankan kepada para masyarakat pembudidaya di kemangi melalui perwakilan untuk memperoleh benih maupun bibit dari Balai Budiaya Air Payau (BBAP) Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jepara yang dimana kedua balai tersebut telah ditunjuk Kementrian Kelautan Dan Perikanan untuk

mendistribusikan benih kepada para pembudidaya. Pernyataan diatas dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“untuk masalah bibit kita menyarankan ke temen-teman yang sudah di tunjuk oleh kementrian, BBAP situbondo dan Jepara, disana udah memprodouksi, ya memang fasilitasnya disana udah memenuhi, itu biasanya mau mengeluarkan bibit, itu sudah di rekom, bahwa (produksi) maksudnya bebas virus penyakit, itu biasanya adalah f1, bahasa biologinya f1 adalah turunan pertama” (wawancara pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 10.00 wib, lokasi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Dinas terkait telah melakukan rekomendasi kepada para pembudidaya, terutama di Kemangi serta agar para pembudidaya mendapatkan bibit yang berkualitas untuk dibudidayakan.

C. Analisis data

1. Perencanaan Strategis Pengembangan Kawasan Minapolitan

a. Memprakarsai dan Menyetujui Proses Perencanaan

Dilihat dari konteks masalah ini dalam memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan pemerintah Kabupaten Gresik ada dua jenis kegiatan yang dilakukan kegiatan tersebut adalah rapat pembentukan tim penyusun perencanaan strategis minapolitan melalui *forum group discussion* dengan melibatkan para pembentuk opini internal yaitu (dan mungkin eksternal) tentang seluruh upaya pencanaan strategis minapolitan ini, pembentuk opini internal dan eksternal yaitu beberapa dinas terkait dan batasan aspirasi dari masyarakat, kegiatan kedua penyusunan terkait masterplan minapolitan. sedangkan secara teoritis dalam memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan harus melibatkan beberapa orang orang penting pembuat keputusan, “Bryson Triton PB, (2007:124) ”

mengatakan dimana perencanaan harus memiliki seluruh unsur baik itu setting yang tepat, Tema, Plot dan Subplot, Pelaku, Adegan, Permulaan, Pertengahan, Konklusi, serta Interpretasi.

Hal ini sesuai dengan salah satu keyakinan yang dapat membantu perencanaan strategis dalam organisasi yang dikemukakan oleh Steiner, dkk dalam Bryson (2007:12-13) yakni membangun kerja kelompok dan keahlian. Keahlian merupakan prioritas dari organisasi. Seseorang yang professional akan membawa organisasi ke dalam suatu perubahan kearah yang lebih baik.

Pada tahap ini tentang kesepakatan awal pebuat keputusan pemerintah Kabupaten Gresik sudah melakukan dengan membentuk kelompok kerja, kelompok kerja ini akan melaksanakan kegiatan yang sudah ditentukan sesuai surat keputusan Bupati, Kabupaten Gresik secara teoritis sudah melakukannya dengan membentuk tim / kelompok kerja pengembangan minapolitan, serta menghasilkan masterplan minapolitan yang sudah mencakup tentang setting yang tepat, tema yang tepat, plot maupun subplot, pelaku, adegan, permulaan, pertengahan, konklusi, serta interpretasi. Tetapi keterlibatan pihak eksternal masih sangat minim dimana dukungan universitas sebagai gudang ilmu pengetahuan dan memiliki sumberdaya manusia yang mampu melahirkan inovasi di berbagai bidang yang dapat diterapkan dalam dunia industri. Sehingga pemanfaatan potensi perikanan budidaya tambak tawar belum bisa semaksimal mungkin. Universitas juga bisa memberi kontribusi melalui bantuan riset, dan fasilitas lainnya untuk menghasilkan karya bermutu, dan mengatur perlindungan dan penggunaan hak cipta. Universitas sebagai bagian integral dari proses pembangunan perlu

dilibatkan, misalnya melibatkan universitas ternama seperti Universitas airlangga dalam bidang meingkatkan budidaya perikanan dimana peran dari beberapa fakultas sangat penting, seperti fakultas ilmu kelautan dan perikanan (FPIK). Bisa juga melibatkan universitas brawijaya yang lebih pakem dalam bidang perencanaan mereka memiliki Fakultas ilmu administrasi (FIA), peran mereka sangat dibutuhkan dalam hal perencanaan.

b. Mengidentifikasi Mandat Organisasi

Ada beberapa panduan yang perlu diperhatikan dalam memperjelas mandat menurut Bryson (1995) ada dua manfaat potensial dari langkah kedua, pertama, kejelasan mengenai apa yang dimandatkan akan meningkatkan kemungkinan bahwa mandat itu akan benar benar dijalankan. Riset menunjukan bahwa salah satu determinan terpenting dari pencapaian sasaran adalah kejelasan dari sasaran itu sendiri. Semakin spesifik sasaran itu, makin mengkin sasaran itu dicapai (Locke dan lain-lain, 1981; Mazmanian dan Sabatier, 1983; Boal dan Bryson, 1987a). Kedua kemungkinan untuk mengembangkan misi yang tidak terbatas pada mandat dipertinggi. Orang – orang dibantu mengamati tujuan potensial tindakan organisasi dengan cara mengetahui apa yang secara eksplisit tidak dilarang. Proses yang menjadi panduan bagi langkah ini adalah sebagai berikut:

- a. Ada orang yang mengumpulkan mandat formal dan informal yang dihadapi oleh organisasi.
- b. Meninjau kembali mandat itu untuk memperjelas apa yang diperlukan dan apa yang dibolehkan.

- c. Selalu mengingatkan anggota organisasi mengenai apa yang diperlu dilakuka organisasi, sebagai cara untuk memastikan kesesuaian dengan mandatnya

Singkatnya, melembagakan perhatian kepada mandat. Pastikan bahwa laporan tahunan, retreats staf, sesi orientasi pegawai baru harus memasukan satu bagian tentang mandat. Metode-metode lainnya dapat juga berguna.

Dilihat dari undang – undang yang tercantum serta mandat Bupati yang dilakukan hanya di tulis membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah tidak memiliki kejelasan atau spesifikasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah banyak yang harus dilakukan seperti urusan pemerintah yang bersifat pilihan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah tersebut.

c. Memperjelas Misi dan Nilai–Nilai Organisasi Yang Akan Menghasilkan Analisis *Stakeholder* Dan Pernyataan Misi Organisasi

Tahap ketiga adalah tahap mengartikulasikan Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi yang akan menghasilkan analisis *stakeholder* dan pernyataan misi organisasi dan merupakan sebuah gambaran atau cita-cita yang ingin dicapai suatu organisasi. Kemudian misi merupakan penjabaran dari visi yang dijadikan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Misi disusun dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan dari internal maupun eksternal SKPD. Misi dipakai sebagai dasar sekaligus batasan pelaku pemerintahan organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat 6 misi yang digunakan dinas kelautan, perikanan, dan peternakan sebagai pegangan serta landasan. Misi tersebut digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kab Gresik khususnya dalam bidang kelautan, perikanan dan peternakan. Berikut adalah kriteria dalam menyusun misi:

- a. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan.
- b. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.
- c. Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi (Akdon, 2006:98).

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Perumusan misi dinas kelautan, perikanan, dan peternakan dilakukan melalui musyawarah yang dilakukan berikut: Ketua Tim: Kepala SKPD Sekretaris Tim: Kasubag TU/pejabat lainnya Kelompok Kerja: Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf SKPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (preffer, 1981) bahwa kesepakatan tentang misi, khususnya jika kesepakatan itu bersifat konsensual (menyangkut pertujuan seluruh anggota yg terlibat), akan dengan sendirinya menjadi sumber kekuatan bagi organisasi. bahwa menyusun

rancangan misi dimulai dengan intuisi dan gagasan-gagasan, berkembang melalui diskusi, dan menghasilkan sebuah arah dan motivasi bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kepala SKPD tidak menentukan sendiri cita-cita organisasi.

Bryson mengatakan misi organisasi dan mandat juga menunjukkan jalan menuju organisasi utama dan menciptakan nilai-nilai masyarakat sedangkan Kotler (1987) mengatakan bahwa misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Dinas kelautan sudah memiliki tujuan organisasi untuk di ekspresikan produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan dan selaras dengan Keputusan Menteri No. 18 tahun 2011 tentang pedoman umum minapolitan dimana yang memiliki misi mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan.

d. Melakukan suatu Analisis SWOT.

Tahap ke empat adalah menilai lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi SWOT. Tahap ini adalah tahap menyediakan informasi tentang kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman organisasi tentang minapolitan yang di hadapinya. Penguraian tahap ini menjadi wahana guna mengidentifikasi isu - isu strategis. Dimana isu strategis berkenaan dengan bagaimana organisasi mampu berhubungan dengan lingkungan di luar. Setiap strategi organisasi yang efektif akan mampu memberi keuntungan dari kekuatan dan peluang sekaligus meminimalikan atau mengatasi kelemahan dan ancaman.

Dalam dokumen masterplan sudah dicantumkan tentang lingkungan internal eksternal, penilaian lingkungan internal eksternal yang efektif seharusnya memberikan manfaat kepada organisasi dalam menjalankan strategi minapolitan diantaranya yang terpenting adalah bahwa penilaian itu menghasilkan informasi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemakmuran organisasi. Dapat disimpulkan bahwa ada kekuatan atau *strength* dari minapolitan berupa program-programnya, usaha yang dilakukan, kepemimpinan maupun sumber-sumber ilmiah. Dimana Keberhasilan sebuah program tidak pernah lepas dari peran serta dan dukungan baik dari aparat pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal pengembangan kawasan minapolitan ini, Pemerintah Kabupaten Gresik akan mensinergikan kebijakan dan kegiatan dengan koordinasi yang intensif baik antar SKPD yang tergabung dalam POKJA dibawah koordinasi Bappeda untuk menjembatani gap yang ada. Sedangkan untuk menangani tantangan yang ada diperlukan adanya usaha yang terpadu, beraneka ragam, terampil, penuh semangat dan juga kemitraan (*partnership*) efektif untuk mencapai tujuannya. Melihat swot yang ada pada penyajian data yang masih menjadi permasalahan utama masih sdm dan pengolahan produksi ikan, serta kelembagaan. dimana menjelaskan koordinasi yang masih belum bisa diselaraskan karena setiap SKPD memiliki kepentingan masing masing.

Pada masterplan minapolitan ada beberapa strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan minapolitan. Matrik di atas menjelaskan proses dalam menentukan strategi apa yang akan di capai oleh pemerintah dalam melaksanakan minapolitan.

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Strength :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sumberdaya air melimpah 2. Produksi ikan melimpah 3. Tenaga kerja banyak 4. Pengalaman & Kemauan masyarakat untuk maju tinggi 5. Sudah ada kelompok Pokdakan 	<p style="text-align: center;">Weakness :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan kualitas ikan rendah 2. Kondisi saluran tambak dan infrastruktur pendukung lainnya kurang memadai 3. Kemampuan SDM terbatas 4. Akses permodalan terbatas 5. Balai benih ikan terbatas 6. Belum ada pangkalan pendaratan ikan budidaya di tiap sub kawasan minapolitan 7. Jalan produksi kondisinya kurang mendukung 8. Peran kelembagaan masyarakat perikanan belum optimal
<p style="text-align: center;">Opportunities :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumsi ikan akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk 2. Lokasi strategis (jalan arteri, tol, pelabuhan) 3. Komoditi ikan sesuai dikembangkan di wilayah perencanaan 4. Terdapat lembaga permodalan yang siap membantu 5. Produksi ikan banyak berpeluang untuk diolah 	<p style="text-align: center;">Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan ketersediaan air yang melimpah untuk meraih hasil produksi yang optimal 2. Produksi ikan yang melimpah harus diikuti dengan pengolahan ikan agar petani tambak mendapatkan nilai tambah 3. Optimisasi SDM & kelompok POKDAKAN (penyuluhan, pelatihan) 	<p style="text-align: center;">Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan cold storage untuk mempertahankan kualitas ikan 2. Normalisasi saluran tambak untuk meraih produksi ikan yang optimal 3. Memberi penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan memperoleh modal 4. Penyediaan pangkalan pendaratan ikan budidaya payau 5. Penyediaan Mina Centre sebagai pusat informasi, pertemuan, pelatihan 6. Peningkatan kualitas jalan produksi dan koleksi 7. Peningkatan peran balai benih secara kualitas maupun kuantitas
<p style="text-align: center;">Threat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banjir dari Bengawan Solo & Kali Lamongan 	<p style="text-align: center;">Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pintu air untuk mengatur keluar masuk air dari saluran 	<p style="text-align: center;">Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Normalisasi saluran untuk menghindari luapan air/banjir 2. Menyediakan pintu air

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pencemaran lingkungan rumah tangga/ industri 3. Terbatasnya fasilitas pendingin yang menjaga kualitas ikan 4. Konversi lahan tambak mengurangi luas lahan budidaya 5. Menurunnya daya dukung lahan budidaya akibat penerapan cara-cara pembudidayaan ikan/udang yang tidak benar 6. Serangan penyakit dan hama 	<ol style="list-style-type: none"> 2. mempertahankan kualitas ikan dengan fasilitas pendinginan yang lebih modern 3. Memberi penyuluhan dan pelatihan pada masyarakat dalam perlakuan terhadap ikan pasca panen 4. Mengoptimalkan peran pokdakan dalam pengolahan ikan budidaya tambak sebagai pusat informasi, pemasaran, penyediaan kebutuhan dasar sarana budidaya (obat, benih, dll) dan pelatihan 5. Turut mengawasi setiap perubahan fungsi lahan sesuai dengan tata ruang yang ada 6. Menjaga kelestarian dan kualitas ekosistem pesisir (bakau, kualitas air) 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan pangkalan pendarantan ikan budidaya payau 4. Penyediaan Mina Centre sebagai pusat informasi, pertemuan, pelatihan 5. Peningkatan kualitas jalan produksi dan koleksi 6. Peningkatan peran balai benih secara kualitas maupun kuantitas 7. Meningkatkan ketahanan kualitas ikan dengan penyediaan cold storage 8. Mengoptimalkan peran pokdakan dalam pengolahan ikan budidaya tambak sebagai pusat informasi, pemasaran, penyediaan kebutuhan dasar sarana budidaya (obat, benih, dll) dan pelatihan 9. Turut mengawasi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
---	--	---

Sesuai teori pemerintah Gresik dalam pelaksanaan pengembangan minapolitan sudah sesuai dengan teori yaitu dengan menerapkan 4 langkah strategi yaitu

a. Strategi SO (*strength* dan *opportunities*)

Strategi ini dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan dilingkungan minapolitan guna menangkap peluang yang dimiliki lingkungan minapolitan, Pada perikanan budidaya dengan memanfaatkan sumber air yang melimpah untuk meraih hasil produksi yang optimal sesuai dengan apa yang diinginkan. Perikanan ikan yang melimpah harus diikuti dengan pengelolaan hasil produksi

perikanan dengan mengoptimalkan Sumberdaya manusia dan kelembagaan yang ada (POKDAKAN) dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan penyuluhan

b. Strategi ST (*strengt* dan *treats*)

Strategi ini diterapkan dimana kekuatan yang dimiliki lingkungan perikanan budidaya tawar digunakan untuk mengatasi ancaman yang mungkin dapat dihadapi perikanan budidaya tawar. Pemerintah dapat menyediakan pintu – pintu air untuk mengatur keluar masuk air dari saluran guna menghindari ancaman banjir yang di hasilkan oleh sungai bengawan solo dan sungai lamongan dan tidak hanya banjir tetapi juga menghindari pencemaran lingkungan yang di hasilkan dari rumah tangga dan industri berupa sampah. Untuk menghindari ancaman dari rusaknya kualitas ikan pemerintah menggunakan teknologi pendinginan yang lebih modern untuk menjaga kualitas perikanan. Serta ada penyuluhan pelatihan guna meningkatkan sdm setelah pasca panen dimana menghindari ancaman konversi lahan atau alih fungsi lahan perikanan maka dari itu pemerintah memberikan pelatihan pelatihan. Mengoptimalkan peran lembaga POKDAKAN sebagai pusat informasi, pemasaran, penyediaan, kebutuhan dasar sarana budidaya dan pelatihan, dalam mengatasi ancaman dari sumberdaya manusia yang masih rendah tentang penerapan cara – cara dalam pembudidayaan.

c. Strategi WO (*weakness* dan *opportunities*)

Strategi ini diterapkan pada saat adanya peluang yang dimiliki pemerintah guna mengatasi ancaman perikanan budidaya. Pemerintah harus melakukan inovasi untuk menangkap peluang yang ada agar kualitas hasil produksi perikanan

terjaga, serta melakukan berbagai normalisasi saluran tambak untuk memberikan hasil perikanan yang optimal dan memberikan penyuluhan, pelatihan dalam meningkatkan kemampuan dalam meraih modal. Menyediakan panggakan pendaratan perikanan budidaya sangat penting mengingat pangkalan ikan budidaya dibutuhkan sebagai wahana pemasaran hasil produksi perikanan serta menyediakan mina centre sebagai pusat informasi, pertemuan, pelatihan karena di mina centre nanti bisa mengetahui apa saja hasil produksi yang dihasilkan dalam perikanan budidaya ini. Serta meningkatkan peran balai benih secara kualitas dan kuantitas.

d. Strategi WT (*weakness* dan *treats*)

Strategi ini diterapkan saat pemerintah harus mampu mengatasi kelemahan yang dimiliki lingkungan minapolitan agar terhindar dari ancaman yang akan dihadapi. Pemerintah harus mampu mencukupi *cold storage*, dengan menyediakan *cold storage* / tempat penyimpanan dengan suhu tertentu guna menjaga produk kualitas perikanan atau bertujuan mempertahankan kesegaran hasil produksi yang menjadi kekurangan dari pemerintah dalam menjaga hasil produksi perikanan.

e. Mengidentifikasi Isu – Isu Strategis

Pada sub bab mengidentifikasi isu – isu strategis ini adalah jantung dari perencanaan isu – isu strategis sangat penting karena isu isu memainkan peran sentral dalam pembuatan keputusan pada penyajian data ada beberapa isu strategi yang harus dihadapi dalam perencanaan strategis pengembangan minapolitan. Pada penyajian data yang telah disajikan terkait isu isu strategis yang di dapat Bryson, (1995) memilahkan empat pendekatan untuk mengidentifikasi isu – isu

strategis, yakni pendekatan langsung, pendekatan sasaran, pendekatan visi keberhasilan, dan pendekatan langsung. Pada minapolitan ini mengidentifikasi isu –isu strategis yang di pakai oleh dinas kelautan, perikanan, dan peternakan dalam mengidentifikasi isu strategis menggunakan pendekatan secara langsung, dalam pendekatan langsung isu – isu strategis langsung mengabil dari aturan aturan kewenangan, kandungan misi, dan analisis SWOT organisasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu - isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan analisis situasi yang terjadi, baik situasi internal maupun eksternal maka diperoleh isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pengembangan minapolitan di Kabupaten Gresik

- a. Mengembangkan potensi perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan serta pengembangan kawasan minapolitan beserta sarana dan prasarana penunjangnya
- b. Memanfaatkan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, aparatur pengawasan dan pembinaan, serta akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d. Memanfaatkan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tapi dalam dokumen isu strategis tidak dijabarkan secara terperinci mengenai apa saja yang menjadi isu-isu strategis perencanaan strategis pengembangan minapolitan. Isu di atas merupakan data olahan peneliti dengan melihat hasil analisis SWOT yang ada pada dokumen.

f. Merumuskan Strategi Untuk Mengelola Isu

Pada tahap ini telah membahas perumusan strategi. Strategi di definisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinikan bagaimana organisasi itu, apa yang di kerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal tersebut. Strategi dapat berbeda tingkat, fungsi, dan kerangka waktu; strategi adalah cara bagaimana organisasi (atau komunikasi) berhubungan dengan lingkungannya. Menurut Spencer 1989 proses pengembangan strategi harus menjawab lima pertanyaan mengenai isu-isu strategis adalah:

- a. Apakah opsi yang dipilih sudah tepat sasaran, visi, dan harapan yang telah disusun sebelumnya mampu menghadapi isu krusial yang telah muncul, kandungan maksud tujuan ataupun visi utamanya?
- b. Dimanakah letak kendala – kendala yang merintang pelaksanaan dari opsi, harapan maupun visi ini?
- c. Ide manakah yang dapat dipergunakan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang teridentifikasi?
- d. Manuver jangka menengah dan panjang manakah yang seyogyanya diperlukan untuk dapat mengimplementasikan ide-ide tersebut secara kongkrit?
- e. Manuver jangka pendek manakah yang seyogyanya diperlukan untuk dapat mengimplementasikan ide-ide tersebut secara kongkrit?

Sebagai berikut strategi-strategi berikut yang dapat ditempuh untuk pengembangan kawasan perikanan Budidaya tambak tawar :

- a. Memanfaatkan ketersediaan air yang melimpah untuk meraih hasil produksi yang optimal
- b. Produksi ikan yang melimpah harus diikuti dengan pengolahan ikan agar petani tambak mendapatkan nilai tambah
- c. Penyediaan cold storage/cool room untuk mempertahankan kualitas ikan
- d. Memberi penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan memperoleh modal
- e. Penyediaan pangkalan pendaratan ikan budidaya payau
- f. Penyediaan Mina Centre sebagai pusat informasi, pertemuan, pelatihan, pemasaran dan pengolahan
- g. Peningkatan kualitas jalan produksi dan koleksi ikan
- h. Peningkatan peran balai benih secara kualitas maupun kuantitas
- i. Penyediaan pintu air untuk mengatur keluar masuk air dari saluran
- j. Memberi penyuluhan dan pelatihan pada masyarakat dalam perlakuan terhadap ikan pasca panen
- k. Mengoptimalkan peran pokdakan dalam pengolahan ikan budidaya tambak sebagai pusat informasi, pemasaran, penyediaan kebutuhan dasar sarana budidaya (obat, benih, dll) dan pelatihan
- l. Turut mengawasi setiap perubahan fungsi lahan sesuai dengan tata ruang yang ada
- m. Menjaga kelestarian dan kualitas ekosistem pesisir (bakau, kualitas air)

- n. Normalisasi saluran untuk meningkatkan kualitas/kuantitas air
- o. Turut mengawasi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan

Berdasarkan dokumen masterplan kawasan minapolitan sudah terdapat strategi yang akan digunakan sehingga proses dalam pembuatan masterplan tidak dapat diamati oleh peneliti. Namun apabila dilihat dari hasil strategi yang terdapat dalam masterplan menjawab pertanyaan strategi lima bagian bahwa

g. Meriview dan Menyetujui Strategi

Dalam step 7 Bryson mengemukakan *“Once strategies have been formulated, the planning team need to obtain an official decision to adopt them and proceed with implementation”*. *Implementation plans will be reviewed on an ongoing basis and revised with the five-year review of the broader NOAA Education Strategic Plan*. Setelah strategi dirumuskan, tim perencanaan perlu untuk mendapatkan keputusan resmi untuk mengadopsi rencana tersebut dan melanjutkan dengan pelaksanaan ". rencana implementasi akan ditinjau secara berkelanjutan dan direvisi dengan review lima tahun seperti yang dilakukan organisasi NOAA dalam rencana strategi pendidikan.

Di Desa Kemangi Kecamatan Bungah telah melakukan review strategi dengan tujuan agar saat implementasi isu yang didapat sesuai dengan strategi yang dihasilkan. Strategi yang telah dirumuskan dan tingkatkan konsensus, yakni:

- a. Strategi yang dikembangkan itu patut terus dikaji dan dipertimbangkan dengan hati-hati.

- b. Strategi-strategi yang telah direvisi akan diajukan kepada pihak-pihak internal dan eksternal, dimana mereka yang kelak akan memutuskan untuk memberikan persetujuan.

Dapat dilihat bahwa Kabupaten Gresik berusaha mengimplementasikan rencana strategis yang telah disiapkan sebelumnya dan melakukan review atau evaluasi hal-hal yang perlu mengalami perbaikan. Rencana yang telah diperbaiki sebagai hasil proses review atau evaluasi kemudian diadopsi sebagai rencana yang dilakukan selanjutnya.

h. Menyusun Suatu Visi Sukses Organisasi

Dalam proses penyusunan visi, beberapa tim perencanaan dapat memulai dengan statemen visioner. Sebagian besar organisasi dapat menunjukkan peningkatan yang substansial dan efektif, mereka hanya mengidentifikasi dan menyelesaikan beberapa isu strategis. hanya pengambil keputusan utamalah yang berurusan dengan hal-hal penting yang dengan cara yang tepat, dan dapat meningkatkan kinerja organisasi secara substansial atau bersifat kerakyatan. Dimana bryson menyatakan

Some organization are able to develop a clearly articulated, agreed upon vision of sucscsess much ealier in the process. Some planning team may start with visionary statemen. In my experience, most organization can demonstrate a substantial improvement in effectiveness it they simply identify and satisfactory resolve a few strategic issues. Most organizations simply do not adress often enough what is truly important; just gathering key decision makers to deal with a few important matters in a timely way can enhance organizational performance substantially.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan masterplan yang telah dihasilkan. Visi yang dibuat sesuai dengan isu dan kondisi di Kecamatan Bungah Desa

Kemangi yaitu potensi budidaya perikanan yang dominan di kawasan minapolitan tersebut yaitu berupa komoditi udang, bandeng, mujair, kakap dan kerapu. Serta sebelum menyusun sebuah strategi untuk budidaya ikan di wilayah minapolitin sebelumnya telah dibuat visi yang dimaksudkan yaitu Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera.

2. Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Minapolita Di Desa Kemangi Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik

Fokus kedua dalam penelitian ini akan membahas mengenai peran stakeholder dalam mendukung dan mensukseskan kawasan minapolitan di desa kemangi kecamatan bungah, oleh karena itu hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dulu sebagai stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan di desa kemangi, kecamatan bungah, Kabupaten Gresik hal ini sesuai dengan pendapat Iqbal (2007:9) bahwa “identifikasi stakeholder merupakan hal yang mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam menganalisis stakeholder terkait dengan implementasi program pembangunan.”

Stakeholder sendiri diartikan sebagai “individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan baik memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan” (Hertifah, 2009:29). Pendapat tentang stakeholder ini dilengkapi dengan pengertian stakeholder menurut Gonsalves et al. “siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki – laki atau perempuan,

komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi dalam setiap tingkat golongan masyarakat”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang disebut dengan *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di desa kemangi, Kecamatan bungah, Kabupaten Gresik adalah individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat (langsung atau tidak langsung), yang memiliki kepentingan dan dapat mempengaruhi atau yang menerima dampak (positif atau negatif) dari adanya pengembangan kawasan minapolitandi desa kemangi, kecamatan bungah, Kabupaten Gresik. Untuk melengkapi pendapat diatas, dalam mengidentifikasi *stakehoder* scheemer berpendapat bahwa dalam mengidentifikasi *stakehoder* dalam pengembangan kawasan minapolitan dapat menggunakan 5 kriteria stakeholder, yaitu : a. Memahami kebijakan yang terkait pengembangan kawasan minapolitan, b. Memiliki kepentingan terkait pengembangan kawasan minapolitan, c. Mempunyai posisi mendukung atau menentang pengembangan kawasan minapolitan, d. Memiliki hubungan dengan stakeholder yang lain dalam pengembangan kawasan minapolitan, e. Dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pengembangan minapolitan.

Berdasarkan kelima kriteria dari screemer (2000), tersebut, maka stakeholder pada pengembangan kawasan minapolitan di desa kemangi kecamatan bungah Kabupaten Gresik merujuk kepada kelompok kerja serta tim koordinasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gresik. Nomor 523/244/HK/437.12/2011 tentang penetapan tim koordinasi dan kelompok kerja pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Gresik. *Stakeholder* yang terlibat

dalam pengembangan kawasan minapolitan tersebut berasal dari elemen pemerintah dan elemen masyarakat. *Stakeholder* dari pemerintah terdiri dari Bupati Gresik, Bappeda, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan masing – masing yang wilayahnya dijadikan pengembangan minapolitan, serta aparatur desa masing masing dari kecamatan. Sedangkan dari masyarakat sendiri yaitu para pembudidaya ikan di desa kemangi kecamatan bungah.

Merujuk pada keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomer 12 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa “ minapolitan merupakan konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan yang didasarkan pada system manajemen kawasan minapolitan serta menerapkan prinsip integrasi, efesien, kualitas dan akselerasi tinggi” berdasarkan konsep pengembangan kawasan minapolitan tersebut dengan memperhatikan komposisi personal stakeholder yang tergabung dalam tim koordinasi dan kelompok kerja pengembangan minapolitan di Kabupaten Gresik, dapat di intepretasikan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat melalui konsep pengembangan kawasnan minapolitan di desa kemangi kecamatan bungah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab dari setiap elemen pemangku kepentingan yang ada, yaitu pemerintah, swasta, serta masyarakat.

“Menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan seluruh aparat dan segala jajaranya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Para politisi dengan kekuatan sosial politiknya harus turut berperan. Dunia

usaha memainkan peranan yang besar terutama dalam bidang ekonomi. Parateoritis dan cendekiawan berperan dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini (opinion leader) turut berperan dalam memberdayakan masyarakat antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan fungsi pengawasa sosial. Bahkan masyarakat harus ikut dilibatkan. Singkatnya pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat yang hanya berperan sebagai penonton, semua harus berperan sebagai pemain. (Siagian, 2008:6)

Secara lebih spesifik, konsep pengembangan kawasan minapolitan yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga menghendaki adanya keterlibatan dari setiap elemen pemangku kepentingan (multi *stakeholder*) yang ada, yaitu pemerintah swasta dan masyarakat.

“Dengan konsep minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan akan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholder*, baik instansi sektoral, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik” (Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010 - 2014).

Berdasarkan hasil penelitian, konsep minapolitan yang menghendaki adanya keterlibatan multi *stakeholder* dari semua elemen pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tidak bisa sepenuhnya diwujudkan dalam pengembangan kawasan minapolitan di desa kemangi kecamatan bungah, karena dalam pelaksanaannya mulai tahun 2010 hingga 2016, stakeholder yang terlibat masih didominasi oleh pemerintah (SKPD Kabupaten, SKPD kecamatan dan perangkat desa) dan elemen dari masyarakat hanya diwakili oleh POKDAKAM

dari desa kemangi, kecamatan bungah. Sedangkan pihak swasta masih belum dilibatkan atau tepatnya masih belum adanya kerjasama antara swasta dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat dalam pengembangan kawasan minapolitan di desa Kemangi, kecamatan bungah.

Masing – masing *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah dari elemen yang berbeda masing – masing dari anggota mempunyai tugas dan peran yang berbeda - beda pula. Berdasarkan Keputusan Bupati Gresik nomor 523/244/HK/437.12/2011 ditetapkan pihak – pihak yang mempunyai wewenang dalam mengelola program pengembangan kawasan minapolitan ini adalah tim koordinasi dan kelompok kerja. Tim koordinasi dan kelompok kerja merupakan satu kesatuan dari pihak – pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan minapolitan di desa kemangi kecamatan bungah Kabupaten Gresik dan mempunyai tugas yang sama sebagai sebuah tim tidak ada perbedaan karena semua keputusan yang akan diambil sebelumnya akan di koordinasikan secara bersama – sama. Adapun perbedaannya terletak pada wewenang masing - masing anggota.

Adapun tugas dari kelompok kerja dan tim koordinasi pengembangan kawasan minapolitan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik secara bersama – sama sesuai dengan Keputusan Bupati Gresik. Nomor 523/244/HK/437.12/2011 tentang penetapan tim koordinasi dan kelompok kerja pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan saran / masukan melalui pengkajian dan penelitian kelayakan penetapan lokasi minapolitan di Kabupaten Gresik

- b. Mempersiapkan dan melakukan sosialisasi pengembangan kawasan minapolitan.
- c. Melakukan koordinasi dan keterpaduan antara sektor dan lintas sektor
- d. Membentuk sekretariat kelompok kerja pengembangan kawasan minapolitan
- e. Menyusun usulan dan perencanaan kawasan minapolitan sesuai dengan Rencana Pengembangan Induk Jangka Menengah (RPIJM)
- f. Memberi masukan dan arahan detail engineering design kawasan minapolitan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan minapolitan Kepada Bupati.

Sedangkan peran stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di desa kemangi kecamatan bungah sesuai dengan kewenangannya masing – masing dalam penelitian ini dibedakan menjadi 5 (lima) kategori sesuai dengan pendapat nugroho (2014: 16-17) yang menyebutkan bahwa sesuai dengan perannya dapat di klasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori yaitu meliputi: *policy creator*, *koordinator*, *fasilitator*, *implementator*, *akselerator*.

a. Policy Creator Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Policy creator adalah stakeholder yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Stakeholder yang berperan sebagai *policy creator* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gresik adalah Bupati Gresik. Bupati Gresik selaku kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah Kabupaten Gresik mempunyai pengaruh dan peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan pengembangan kawasan minapolitan.

Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan pada awalnya merupakan kebijakan *topdown* yang berasal dari pemerintah pusat melalui kementerian kelautan dan perikanan. Kebijakan pengembangan kawasan ini menghendaki adanya pembangunan ekonomi masyarakat di daerah dengan motor penggerak adalah perikanan dan kelautan. Sesuai dengan keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.18/Men/2011 menyebutkan bahwa suatu daerah harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu agar ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Setelah daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan minapolitan maka pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan berada pada tanggung jawab masing – masing daerah. Hal ini merupakan peluang bagi setiap daerah yang memiliki potensi perikanan baik budidaya maupun kelautan ikut berpartisipasi dan menyiapkan kawasannya agar menjadi kawasan minapolitan.

Bupati Gresik selaku pimpinan tertinggi pada pemerintahan Kabupaten Gresik mempunyai pengaruh dan peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan yang selanjutnya dijadikan sebagai arahan dan pedoman bagi tim koordinasi dan kelompok kerja dalam melaksanakan pengembangan kawasan minapolitan. Setelah ditetapkannya Kabupaten Gresik sebagai kawasan minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/Men/2010 pada tahun 2010, maka Bupati Gresik mengeluarkan kebijakan sebagai landasan agar terlaksananya pengembangan kawasan minapolitan. Kebijakan tersebut sebagaimana mulai berlaku pada tanggal 03 januari 2011 dan di umumkan dalam berita daerah tanggal 18 april 2011 ialah penetapan tim koordinasi dan kelompok kerja pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten

Gresik, melalui keputusan Bupati inilah yang menjadikan landasan hukum bagi stakeholder yang tergabung dalam tim koordinasi dan kelompok kerja untuk bertanggung jawab pada pelaksanaan pengembangan minapolitan. Serta dikeluarkannya kebijakan penetapan kawasan pengembangan minapolitan. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Bupati tersebut menggambarkan bahwa Bupati Gresik memiliki kekuasaan yang paling tinggi dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gresik, Kecamatan Bungah, Desa Kemangi.

b. Koordinator Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Koordinator diartikan sebagai *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat (Nugroho, 2014:16). *Stakeholder* yang berperan sebagai koordinator dalam pengembangan kawasan minapolitan di Desa kemangi Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik adalah Bappeda Kabupaten Gresik. Bappeda Kabupaten Gresik merupakan *stakeholder* yang sangat penting dalam berhasil atau tidaknya pengembangan kawasan minapolitan di Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik karena hal Bappeda Kabupaten Gresik bertanggung jawab sebagai ketua dalam tim koordinasi pengembangan kawasan minapolitan. Ditetapkannya Bappeda sebagai ketua tim koordinasi dalam pengembangan kawasan mapolitan di kecamatan bungah sebagai kawasan minapolitan khususnya di desa kemangi dilandasi pada tupoksi yang dimilikinya, dimana Bappeda memiliki tupoksi dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan mulai pengajuan usulan, perencanaan, pelaksanaan hingga

monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo menyatakan:

“Dalam pelaksanaan berbagai program di dalam suatu sektor atau antar sektor, terutama yang memperoleh prioritas dan yang melibatkan berbagai departemen/ lembaga tersebut. Pertama, perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/ lembaga mana yang secara fungsional “akan diserahkan wewenang mengkoordinasi program dalam suatu sektor atau antar sektor tersebut. Sebaiknya wewenang tersebut diletakkan pada badan/ lembaga yang secara fungsional paling bertanggung jawab atas program – program sektor atau antar sektor tersebut. Tetapi juga seringkali diberikan kepada suatu badan atau pejabat yang wewenangnya memang koordinasi antar lembaga”, (Tjokroamidjojo, 1985:198).

Peran Bappeda sebagai pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan kawasan minapolitan, seperti yang di ungkapkan Moekijat (1994:40) yang menyatakan:

“Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang – orang, baik pada tingkatan peencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada lain yang dapat menggantikannya”

Bappeda sebagai ketua sekaligus sebagai koordinator dalam pengembangan kawasan minapolitan berperan dalam menyelaraskan kegiatan yang dilakukan oleh masing – masing *Stakeholder*. Salah satu sarana dalam menyelaraskan gerak antar stakeholder adalah melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda, yaitu rapat koordinasi dilakukan 2 kali dalam satu tahun dimana dilaksanakan pada awal dan akhir tahun guna membahas perencanaan program dan anggaran di awal tahun dan evaluasi terkait kinerja pengemangan kawasan minapolitan di akhir tahun. Intensitas koordinasi semacam ini dirasa masih belum efektif, karena pengembangan kawasan minapolitan melibatkan banyak *stakeholder* dengan tugas, fungsi, karakteristik yang berbeda,

sehingga dibutuhkan kegiatan koordinasi yang lebih intensif lagi untuk menyelarskan kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan. Dalam wawancara yang dilakukan pada dinas, Bappeda telah melakukan usaha dalam meningkatkan intensitas koordinasi dengan menyelenggarakan tribulanan, tetapi dalam melaksanakan tribulanan ini penyelenggaraannya masih sering terdapat keterlambatan, jadi dala hal ini masih belum efektif.

c. Fasilitator Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Fasilitator adalah stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutkkan kelompok sasaran (Nugroho, 2014:17). Fasilitator dalam pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan bungah tepatnya desa kemangi Kabupaten Gresik adalah tim koordinasi dan kelompok kerja minapolitan. Adapun stakeholder beserta perannya dalam pengembangan kawasan minapolitan di Gresik yang di kategorikan sebagai fasilitator yaitu:

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian daerah berbasis perikanan, dinas Kelautan, Perikanan, dan peternakan Kabupaten Gresik mempunyai peran yang cukup besar dalam pengembangan kawasan minapolitan, hal ini ditunjukan dengan banyaknya fasilitas sarana prasarana, dan pengembangan teknologi yang sudah disediakan baik berasal Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dengan menggunakan APBD atau dari pusat yang kemudian difasilitasi oleh Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang berada di daerah. Dimana ada dana hibah melalui program usaha mina pedesaan (PUMP)

dan Dana Dekonsentrasi 2011. Bantuan PUMP dan Dana Dekonsentrasi bersumber dari APBN melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan selanjutnya untuk operasional di Kabupaten hingga dana tersebut di terima oleh masyarakat difasilitasi oleh Dinas Kelautan, perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Termasuk bertanggung jawab dalam menyeleksi dan merekomendasikan kelompok – kelompok pembudidaya yang berhak menerima dana tersebut sekaligus bertanggung jawab mengontrol dan mengawasi penggunaan dana tersebut di masyarakat.

Fasilitas, sarana dan prasarana lainnya juga sudah banyak yang disediakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan biasanya dalam bentuk paket bantuan, paket kegiatan maupun melalui pengembangan teknologi budidaya yang bermanfaat bagi pengembangan usaha budidaya perikanan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha budidaya perikanan di Kawasan Minapolitan. Dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas hasil budidaya oleh masyarakat, Dinas Kelautan, Perikanan, dan peternakan memakai metode demonstrasi plot, demplot atau demonstrasi plot yaitu tehnik penyuluhan perikanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan teknologi perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi pelaku utama atau usaha perikanan.

Peran Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan juga dapat dilihat melalui pelatihan – pelatihan kepada masyarakat pembudidaya. Dimana pelatihan – pelathan ini tidak hanya diselenggarakan oleh dinas namun juga banyak diselenggarakan oleh

instansi ataupun provinsi dan peran dinas yaitu memfasilitasi para pembudidaya yang mengikuti pelatihan tersebut serta mendampingi para pembudidaya yang mengikuti pelatihan tersebut.

Namun berdasarkan pengamatan penulis dilapangan terkait pelatihan yang sudah ada masih kurang merata karenan adanya sistem perwakilan dari masing – masing Pokdakan sehingga tidak semua anggota kelompok dapat menerima pemahaman yang sama. Serta pelatihan pelatihan hanya fokus terkait teknis budidaya perikanan. Sehingga dirasa kurang untuk mengembangkan agribisnis perikanan secara menyelurh oleh karena itu perlu adanya pelatihan tentang kewirausahaan dalam bidang produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen SDM pembudidaya.

2. Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan pengamatan penelitian di lapangan, Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik memiliki kualitas air yang tidak begitu melimpah. Meskipun Desa tersebut terletak di dekat hulu sungai Bengawan Solo. Secara normatif yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah tugas dan tanggung jawan Dinas PU dalam minapolitan yaitu menyediakan infrastruktur jalan dan saluran air dan drainase untuk kawasan minapolitan. Namun untuk tahun ini kinerja yang dilakukan oleh Dinas PU tersebut belum terlalu signifikan dikarenakan memang fasilitas untuk kawasan minapolitan sudah tersedia sebelumnya sehingga dalam proses pengembangan kawasan selama ini yang berperan secara aktif masih dilakukan oleh Dinas

Kelautan, Perikanan dan Peternakan hingga beberapa pengawasan untuk perawatan infrastruktur juga diambil peran oleh DKP.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007, disebutkan bahwa jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Dalam penyediaan infrastruktur saluran irigasi yang baik di kawasan minapolitan Dinas PU berperan dalam pembangunan irigasi primer dan sekunder. Maksudnya primer merupakan pembangunan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk, saluran pembangunannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap. Sedangkan sekunder merupakan pembangunan irigasi yang terjadi atas saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.

Adapun juga Tupoksi dalam menyediakan infrastruktur berupa jalan lingkungan, adapun beberapa jenis jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang jalan yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan Dinas PU Kabupaten Gresik cukup baik dalam melakukan perannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya proyek-proyek pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan di kawasan minapolitan. Dinas PU senantiasa mengajak masyarakat di Kecamatan Bungah untuk memberikan usulan program yang sesuai dengan keadaan di lapangan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di Kawasan Minapolitan.

Melihat kondisi yang terdapat di Kabupaten Gresik saat ini proses perbaikan memang sudah sesuai dengan Peraturan UU dimana harus melalui proses usulan secara *Bottom Up*. Begitu pula dalam hal perawatan yang dilakukan oleh Dinas PU juga terdapat pada jalan arteri maupun kolektor. Saluran irigasi yang diperbaikipun juga merupakan bagian irigasi primer dan sekunder sesuai kapasitas Dinas PU sedangkan untuk irigasi tersier merupakan kapasitas untuk Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bungah

Keterlibatan peran SKPD Kecamatan Bungah dalam pengembangan kawasan minapolitan adalah ikut dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh SKPD Kabupaten di wilayah Kecamatan Bungah Desa Kemangi Kabupaten Gresik dan memberikan saran dan masukan bagi tim koordinasi terkait program-program pembangunan yang sesuai dengan lapangan dan yang dibutuhkan masyarakat. Meskipun dalam susunan kelompok kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan sesuai dengan keputusan Bupati No. 523/244/HK/437.12/2012. Camat Kecamatan Bungah berfungsi sebagai ketua kelompok kerja minapolitan namun dalam pelaksanaannya selama ini terkait dengan koordinasi antar stakeholder semuanya dikoordinasikan oleh BAPPEDA artinya dalam koordinasi tidak ada perbedaan antara tim koordinasi dan kelompok kerja. Yang membedakan adalah tim koordinasi beranggotakan SKPD tingkat Kabupaten yang mempunyai program pembangunan di kawasan minapolitan sedangkan kelompok kerja adalah perwakilan-perwakilan dari Kecamatan Bungah yang wilayahnya digunakan sebagai sasaran Kawasan Minapolitan, sehingga

kelompok kerja berperan dalam membantu mengawasi pembangunan yang sudah dilakukan di wilayahnya. Serta koordinasi dengan stakeholder yang lain turut berperan dalam mengevaluasi dan memberikan saran serta masukan terkait dengan yang sudah maupun yang akan dilakukan oleh SKPD Kabupaten.

4. Perangkat Desa Kemangi di Kecamatan Bungah

Perangkat desa di Kecamatan Bungah mempunyai peran dalam mengevaluasi dan memberikan saran dan masukan kepada tim koordinasi minapolitan terkait program-program pengembangan kawasan minapolitan yang sesuai dengan kondisi lapangan yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayahnya karena perangkat desa lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga pembudidaya ikan. Maka, perangkat desa mempunyai peran langsung dalam membantu masyarakat ketika masyarakat membutuhkannya. Perangkat desa sebagai elemen pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat mempunyai peran mendukung masyarakat yang ada di desa dengan cara memberikan pelayanan administrasi yang baik, yang memerlukan misalkan dalam hal sertifikasi tanah, pengambilan pupuk yang sangat dibutuhkan pembudidaya ikan. Selama ini menurut peneliti hubungan perangkat desa dengan masyarakat di Desa Kemangi bisa dibilang sudah baik. Hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan gotong royong perangkat desa dengan masyarakat dalam memperbaiki infrastruktur ataupun fasilitas perikanan yang ketika ada permasalahan.

d. Implementator Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Implementator adalah stakeholder pelaksana kebijakan, di dalamnya termasuk kelompok sasaran pengembangan kawasan minapolitan (Nugroho, 2014:17). Dalam pengembangan kawasan minapolitan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah, stakeholder yang berperan sebagai implementator adalah masyarakat pembudidaya ikan. Masyarakat pembudidaya ikan mempunyai peran yang sangat penting sebagai objek sasaran atau turut memberikan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan kawasan minapolitan. Keberadaan perwakilan masyarakat dalam kelompok kerja memiliki peran yang sangat strategis. Dimana dengan adanya perwakilan masyarakat pemerintah dapat mengetahui keadaan terbaru dari masyarakat serta program-program pengembangan kawasan minapolitan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pembudidaya ikan. Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Bungah yang menempatkan masyarakat bukan saja menempatkan sebagai objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek dalam suatu pembangunan, memberikan interpretasi bahwa dalam pengembangan kawasan minapolitan pemerintah telah berusaha dalam mewujudkan pembangunan sesuai dengan pendekatan pembangua berkelanjutan (*sustainable development*) yang salah satu prinsipnya adalah, “pembangunan yang memberikan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pembangunan yang berpusat kepada manusia atau *people center development* dan

meningkatkan pemberdayaan manusia *promote and the empowerment people*" (Suryono, 2004:83).

Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari keaktifannya dalam kegiatan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Dinas maupun yang diselenggarakan oleh Provinsi atau Pusat atau dari lembag-lembaga yang lain yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan dan pengetahuan para pembudidaya ikan. Masyarakat juga mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan kawasan minapolitan sebagai mitra atau partner pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan budidaya perikanan seperti yang dilakukan oleh Bapak M.G (L: 43th) salah satu pembudidaya ikan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah yang diadakan oleh Provinsi atau Pusat.

Dengan adanya kegiatan pelatihan seperti pelatihan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di Kawasan minapolitan sehingga pengetahuan dan kemampuan masyarakat akan semakin berkembang dan membawa dampak positif terhadap peningkatan hasil dan kualitas produksi perikanan dari masyarakat.

e. Akselerator Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Akselerator, merupakan stakeholder yang berperan mempercepat atau memberikan kontribusi agar program minapolitan dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya (Nugroho, 2014:17). Dalam pengembangan kawasan minapolitan di Desa Kemangi Kecamatan Bungah, stakeholder yang berperan yaitu Dinas Kelautan yang memiliki UPT

Pengembangan Budidaya dan Penangkapan ikan dan UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Ternak. Akselerator berperan secara maksimal dengan memperhatikan beberapa cara berikut:

- a. Melakukan sosialisasi terhadap prinsip-prinsip administrasi dan pengendalian yang baik, termasuk bila memungkinkan prinsip-prinsip itu dapat masuk
- b. Menguji kecukupan *Critical Control Point* pada setiap sistem yang ada (aplikasi komputer, *internal policy* dan lain-lain) baik sebelum diluncurkan maupun dalam bentuk evaluasi efektifitas sistem.
- c. Mengamati komitmen unit kerja/fungsi tugas terkait dalam menjalankan administrasi dan pengendalian sesuai dengan sistem yang berlaku, melalui uji kepatuhan (*compliance test*).
- d. Melakukan sinergi peran pengawasan dengan unit kerja lain melalui penugasan audit atau fungsi pengawasan bersama (*joint controlling*).